

SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM UPAYA
PEMULIHAN EKONOMI MELALUI PROGRAM LORONG
WISATA DI KOTA MAKASSAR**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Collaborative Governance Dalam Upaya
Pemulihan Ekonomi Melalui Program Lorong
Wisata Di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Eko Miftahul Farid

Nomor Induk Mahasiswa : 1056111111918

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si


Dr. Abdi, M. Pd

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Negara


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM : 730727



Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

NBM : 991742



HALAMAN PERNERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/ undangan menguji ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0355/FSP/A.4-II/I/46/2025 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Makassar pada hari Selasa, 28 Januari 2025.

Mengetahui

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.sos., M.Si
NBM : 730727


Dr. Andi Lutfur Prianto, S.IP., M.Si
NBM : 992797

TIM PENGUJI :

1. Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
2. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos., M.Si
4. Dr. Syukri, S. Sos., M.Si

()
()
()
()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : EKO MIFTAHUL FARID

Nomor Induk Mahasiswa : 105611111918

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Agustus 2024

Yang Menyatakan

EKO MIFTAHUL FARID

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan taufik-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini berjudul *Collaborative Governance* Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Melalui Program Lorong Wisata di Kota Makassar.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ibu Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Nur Wahid, M.Si dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP Ketua dan Sekretaris Program Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M. Si. Pembimbing I yang penuh dengan kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan mulai penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abdi, M. Pd. Pembimbing II yang penuh dengan kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan mulai penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Dinas Pariwisata Kota Makassar beserta pegawai yang senantiasa membantu dan mengayomi peneliti selama melakukan penelitian ini.
7. Kantor Kelurahan Tello Baru beserta pegawai yang senantiasa membantu dan mengayomi peneliti selama melakukan penelitian ini.
8. Terkhusus dan istimewa penulis menyampaikan yang tulus kepada kedua orang tua saya yang telah mendidik dan membimbing saya dari kecil hingga dewasa dan selalu memberikan pengajaran yang berharga, dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moral maupun materil.
9. Teman teman kelas saya IAN C 2018 yang selau memberikan support dan saran dalam penyelesaian penelitian ini.
10. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini, maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Makassar, 08 Januari 2025

Yang Menyatakan,



Eko Miftahul Farid

ABSTRAK

Eko Miftahul Farid. 2025. *Collaborative Governance Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Melalui Program Lorong Wisata di Kota Makassar*. (Dibimbing oleh Muhlis Madani dan Abdi).

Collaborative governance adalah cara untuk membuat keputusan bersama antara berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan organisasi lain. Tujuan penelitian adalah untuk *Collaborative Governance Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Melalui Program Lorong Wisata di Kota Makassar*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan tipe penelitian adalah fenomenologi Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 orang.. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi

Hasil penelitian yaitu Dinamika Kolaborasi pada Program Lorong Wisata di Kota Makassar berhasil menerapkan kolaborasi efektif antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, dengan fokus pada pariwisata berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tindakan kolaborasi dalam program ini sangat bergantung pada fasilitasi yang baik, yang mengkoordinasi peran semua pihak dan memastikan komunikasi serta koordinasi yang jelas untuk mencapai tujuan bersama. Dan Dampak kolaborasi ini terlihat dalam peningkatan ekonomi lokal, dengan lebih banyak wisatawan dan peluang bagi pelaku usaha kecil. Namun, umpan balik masyarakat menunjukkan perlunya perbaikan fasilitas, pelatihan bisnis, serta perhatian pada kebersihan dan keamanan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Pemulihan Ekonomi, Lorong Wisata

ABSTRACT

Eko Miftahul Farid. 2025. Collaborative Governance in Economic Recovery Efforts Through the Lorong Wisata Program in Makassar City. (Supervised by Muhlis Madani and Abdi).

Collaborative governance is a method of decision-making that involves various stakeholders, such as the government, the community, and other organizations. The aim of this study is to explore collaborative governance in economic recovery efforts through the Lorong Wisata program in Makassar City.

This research uses a qualitative approach with a phenomenological research design. The study involves 7 informants. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis is carried out using Miles and Huberman's model, which includes data collection, data reduction, data presentation, and concluding or verification.

The results of the study show that the collaboration dynamics in the Lorong Wisata Program in Makassar City successfully implemented effective collaboration between the government, the community, and business actors, with a focus on local wisdom-based tourism and community economic empowerment. The collaborative actions in this program highly depend on good facilitation, which coordinates the roles of all parties and ensures clear communication and coordination to achieve shared goals. The impact of this collaboration is evident in the increase of local economy, with more tourists and opportunities for small business owners. However, community feedback highlights the need for improvements in facilities, business training, as well as attention to cleanliness and security.

Keywords: *Collaborative Governance, Economic Recovery, Tourist Alley*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR HASIL	i
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Konsep Collaborative Governance	14
C. Program Lorong Wisata	26
D. Kerangka Konsep.....	31
E. Fokus Penelitian.....	32
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	33
D. Informan Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Profil Kota Makassar.....	39
2. Dinas Pariwisata Kota Makassar.....	44
3. Lorong Wisata Kelurahan Tello Baru	50

B. Hasil Penelitian	55
1. Dinamika Kolaborasi	55
2. Tindakan Kolaborasi	71
3. Dampak serta Adaptasi dalam Proses Kolaborasi.....	83
C. Pembahasan Penelitian.....	87
1. Pembahasan Dinamika Kolaborasi	87
2. Pembahasan Tindakan Kolaborasi	92
3. Pembahasan Dampak Dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi.....	96
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	101



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan.....	34
Tabel 4. 1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Makassar, 2023	41
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Makassar.....	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konsep <i>Collaborative Governance</i>	32
Gambar 4. 1 Peta Kota Makassar	42
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Makassar.....	49
Gambar 4. 3 Kolaborasi Pemkot makassar dengn Media Berita	57
Gambar 4. 4 Lorong Wisata Kota Makassar, Upaya Pemerintah Perkuat Kemandirian Ekonomi Masyarakat.....	59
Gambar 4. 5 Pemberdayaan perempuan di lorong wisata melalui kegiatan pelatihan merajut.....	67
Gambar 4. 6 Pertemuan Rutin dengan Dewan Lorong Wisata	69
Gambar 4. 7 Usaha di Lorong Wisata Sydney Tello Baru.....	70
Gambar 4. 8 Pemerintah Fasilitasi Lorong Wisata	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2020, dunia memasuki babak baru ketika seluruh negara dihadapkan pada krisis global akibat munculnya penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan segera menyebar ke seluruh dunia, menciptakan krisis kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada 31 Desember 2019, tercatat 41 orang terinfeksi dan satu orang meninggal, yang menjadi tanda dimulainya pandemi global yang mengubah tatanan dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menduga bahwa virus ini berasal dari hewan yang dijual di pasar Wuhan, dengan kelelawar sebagai salah satu vektor utama penularan ke manusia. Penyebarannya yang cepat ke berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, Afrika, dan Asia Tenggara, menyebabkan dampak luas dalam berbagai aspek kehidupan (Rayhannisa & Pambudi, 2024).

Di Indonesia, kasus Covid-19 pertama kali terdeteksi pada 17 Maret 2020, dengan dua orang yang memiliki riwayat perjalanan ke negara terdampak. Dalam waktu singkat, jumlah kasus meningkat tajam, dan pada 31 Mei 2020, tercatat 557 kasus baru dalam satu hari, dengan total 25.773 kasus positif, 7.015 orang sembuh, dan 1.573 orang meninggal dunia (Saadah et al., 2023) . Melihat kondisi ini, pemerintah pusat menetapkan Covid-19 sebagai Bencana Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, yang menegaskan perlunya penanganan terpadu terhadap wabah ini.

Salah satu tantangan utama bagi pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kota Makassar, adalah pemulihan ekonomi setelah pandemi. Pemerintah Kota Makassar merancang program Lorong Wisata untuk mendorong pariwisata dan meningkatkan ekonomi lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana model kerja sama pemerintahan diterapkan dalam mendukung Program Lorong Wisata sebagai upaya pemulihan ekonomi Kota Makassar karena program ini tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga mengandalkan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti sektor swasta, masyarakat, dan akademisi.

Komisi ini menggabungkan kewenangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 yang sebelumnya berperan sebagai otoritas pusat penanganan dampak covid-19 dengan kewenangan kementerian atau lembaga untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi karena pandemi ini. Akibatnya, gugus tugas tersebut bersama 18 organisasi negara lainnya dibubarkan dan sebagian di antaranya mengalihkan kewenangannya kepada komite ini (Peraturan Presiden, 2020)

Selanjutnya pada pasal 8 Peraturan Presiden No 108 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Peraturan Presiden, 2020), Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional
- b) Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional termasuk

permasalahan yang dihadapi sektor-sektor usaha riil secara cepat dan tepat

- c) Melakukan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional
- d) Menetapkan dan menetapkan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.

Permasalahan pemulihan ekonomi merupakan tantangan yang sulit bagi pemerintah sehingga dibutuhkannya kolaborasi dari beberapa pihak. Pihak-pihak yang terlibat secara kolaboratif tersebut diharapkan dapat memberikan sebuah pengaruh yang positif diantaranya meningkatkan pemulihan ekonomi. Pemerintah dalam menciptakan pemulihan ekonomi kepada masyarakatnya serta meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara apa yang telah dilaksanakan.

Pemerintah daerah juga mengambil tindakan tegas dalam menghadapi pandemi, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/257/2020, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan sesuai dengan dua kasus positif pertama yang dilaporkan di provinsi ini pada 19 Maret 2020. Sebagai pusat kota metropolitan di Kawasan Indonesia Timur, Makassar menjadi pusat penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Makassar, Gowa, dan Maros.

Kota Makassar adalah salah satu kota di Indonesia yang berkembang secara pesat. Perkembangan populasi dan pembangunan infrastruktur seperti pusat

belanja, pemukiman, dan lokasi wisata adalah buktinya. Pada tahun 2021, total penduduk Makassar adalah 1.427.619 orang, dengan 711.006 pria dan 716.613 wanita. Kota Makassar menghadapi banyak masalah sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Setiap tahun, pemerintah kota Makassar berusaha untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Dari tahun 2021 hingga 2024, walikota Makassar telah membangun berbagai program untuk menangani masalah yang ada di kota. Salah satunya adalah program "Smart Panyingkulu" untuk penataan simpang jalan.

Walikota Makassar telah meluncurkan Koridor Hijau untuk mewujudkan kota yang bersih, aman, nyaman, terampil, dan sejahtera. Selain itu, walikota telah meluncurkan program Lorong Garden untuk meningkatkan penghijauan kota dengan menanam tanaman hias, sayuran, dan hortikultura lainnya. Dengan membangun Lorong Sehat dan Lorong Garden, pemerintah kota Makassar telah melakukan kemajuan dalam hal lorong, yang menghasilkan penghargaan, termasuk penghargaan dari Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) pada tahun 2022.

Pemerintah Kota Makassar membangun program unggulan yang disebut Lorong Wisata untuk membantu pemulihan ekonomi kota. Koridor pariwisata mencakup lebih banyak daripada hanya destinasi wisata baru. Pemerintah kota Makassar berusaha untuk menghidupkan kembali ekonomi kota melalui Program Lorong Wisata. Tujuan dari program lorong wisata adalah untuk meningkatkan ekonomi Makassar dan mendorong UMKM. Ini adalah bagian dari program yang terangkum pada bagian Memulihkan kota Makassar dengan pemberdayaan

UMKM. Di Makassar, UMKM berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Lorong Wisata Kota Makassar memiliki potensi besar untuk pengembangan UMKM.

Dengan potensi lorong yang terus menerus meningkat, sejak akhir 1 tahun 2021 Walikota Makassar membuat program Lorong Wisata (LONGWIS) sebagai program dalam penanggulangan dampak ekonomi dan pariwisata setelah COVID-19. Program Lorong Wisata menjadi program unggulan pemerintah kota Makassar tak hanya dalam penanggulangan masalah sampah akan tetapi menjadi solusi dalam menarik wisatawan dengan partisipasi masyarakat dan juga perangkat daerah.

Pemerintah Kota Makassar membuat program Lorong Wisata dengan tujuan melakukan pemetaan dan klusterisasi potensi lorong berbasis teknologi informasi berdasarkan potensi lorong terkait dengan potensi SDM, potensi fisik lingkungan dan pengembangan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah kota Makassar menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk mengembangkan ekonomi lorong berdasarkan potensi yang dimiliki. Potensi yang dimiliki lorong pun beragam seperti pengembangan usaha dan kawasan kuliner, pembinaan dan pengembangan budaya & seni, peningkatan budidaya tanaman, pembinaan pendidikan, serta berbagai potensi lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lorong yang ada di kota Makassar.

Dalam pengembangan program Lorong Wisata oleh pemerintah kota Makassar dibutuhkan hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, sektor swasta dan juga masyarakat dalam mewujudkan *Good Governance*.

Pemerintah dalam hal ini menjadi fasilitator dan memiliki peran serta fungsinya dalam membuat dan menentukan seluruh kebijakan atau program demi kebersihan serta keindahan lingkungan setempat yang dapat menarik wisatawan. Di tahun pertama Lorong Wisata dicanangkan oleh pemerintah kota Makassar diberlakukan target yaitu 7 lorong pada masing-masing kelurahan sehingga pada tahun 2022 telah terbentuk lebih dari 1.000 Lorong Wisata yang tersebar di seluruh wilayah kota Makassar dari target 5.000 Lorong Wisata selama periode Walikota 2021-2024 berlangsung dengan bantuan dari masyarakat setempat, NGO dan juga kerjasama dengan pihak swasta (<https://ppid.makassarkota.go.id/home/detailberita/558>).

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai kolaborasi yaitu kolaborasi antara para pelaku seperti masyarakat dan pihak swasta dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Undang-undang Pemerintahan Daerah telah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah harus turut serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan daerah yang terbagi dalam berbagai kegiatan dalam hal ini mewujudkan program Lorong Wisata milik pemerintah kota Makassar.

Collaborative Governance menjadi salah satu acuan dalam sebuah proses kegiatan pemerintahan dimana dengan berkolaborasi pemerintah mampu bersinergi dengan semua pihak dalam mencapai tujuan pemerintahan. Keterlibatan pihak non-pemerintah dalam tata kelola pemerintahan akan memberi banyak kontribusi baik dari sisi anggaran maupun sisi inovasi dalam tata kelola

pemerintahan yang ada, khususnya melalui jalinan kolaborasi yang dibangun. Hal tersebut menjadi penting mengingat dengan keterlibatan berbagai elemen dalam tata kelola pemerintahan akan memunculkan inovasi-inovasi baru serta rasa memiliki tanggung jawab bersama dalam pengelolaan pemerintahan yang ada. Demikian pula halnya dalam kegiatan pengelolaan pariwisata yang menjadi leading sector unggulan setiap wilayah di Indonesia dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah, menjadi trend tersendiri di era Revolusi Industri 4.0.

Hasil penelitian (Hasna & Darumurti, 2023) menjelaskan bahwa bentuk *Collaborative Governance* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan LSM BINTARI Foundation diwujudkan kedalam beberapa program seperti kajian dan riset, pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana dan MCK Adaptif di wilayah Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara. Program tersebut telah berhasil mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh banjir rob. Meskipun demikian, adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki mengakibatkan bentuk program mitigasi banjir rob belum merata ke seluruh wilayah Kota Pekalongan.

Selanjutnya penelitian (M. & Senaen, 2020) kolaborasi sinergi yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya dengan fokus utama mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir. Kolaborasi ketiga pihak memberikan warna baru terhadap pariwisata di Surabaya, Kota Metropolitan memiliki wisata berkonsep adventure land dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat menjadi pencapaian terbaik Pemerintah Kota Surabaya. Namun, masih ada pengembangan yang harus terus diupayakan dalam pengembangan wahana dan fasilitas Romokalisari Adventure Land agar dapat

meningkatkan daya tarik wisatawan dan menjadikan Romokalisari Adventure Land sebagai tempat wisata berkelanjutan serta dapat dinikmati dalam jangka panjang di Kota Surabaya.

Konsep kolaborasi ini kemudian berkembang hingga konsep kolaborasi antara pemerintah dan pihak lainnya yang sering disebut sebagai *collaborative governance*. Konsep *Collaborative Governance* didefinisikan sebagai susunan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan stakeholder non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus dan deliberatif, yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola kebijakan program atau mengelola suatu aset. Dengan hadirnya konsep *Collaborative Governance* maka diharapkan akan terjadi kerjasama yang baik antara pemerintah maupun stakeholder non pemerintah. Akan tetapi, dalam melaksanakan kolaborasi tentunya perlu melalui beberapa tahap ataupun proses agar para pihak setuju untuk melakukan kolaborasi yang pasti membuat pihak non-pemerintah maupun pemerintah mempertimbangkan banyak hal seperti dampak dari kolaborasi, manfaat kolaborasi untuk kedua pihak dan kapan saja para pihak perlu terlibat.

Proses kolaborasi dalam program Lorong Wisata antara pemerintah kota Makassar dan pihak non-pemerintah dapat membantu keberlangsungan program utamanya dalam hal sumber daya. Hal ini telah dilakukan pemerintah kota Makassar melalui kerjasama dalam program Lorong Wisata dengan salah satu pihak swasta (Gojek) saat pembentukan Lorong Wisata pertama kali pada tahun 2021. Dalam pembentukan Lorong Wisata, pemerintah kota Makassar

menghimbau agar setiap Lorong memiliki daya tarik dalam hal kuliner, budidaya tanaman/ikan, kerajinan tangan serta ciri khas seperti mural dan spot foto bagi 4 pengunjung lorong. Namun, tidak semua lorong wisata aktif dalam mengembangkan semua potensi lorong yang dimiliki. Beberapa hanya mengembangkan potensi kuliner dan beberapa hanya mengembangkan potensi kerajinan. Hal ini dipengaruhi dengan bagaimana proses kolaborasi yang terjadi di dalam sebuah lorong, apakah kolaborasi berjalan dengan baik ataupun ada hal yang menghambat terjadinya kolaborasi sehingga hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Dinamika kolaborasi dalam upaya pemulihan ekonomi melalui program Lorong Wisata di Kota Makassar?
2. Bagaimana Tindakan kolaborasi dalam upaya pemulihan ekonomi melalui program Lorong Wisata di Kota Makassar?
3. Bagaimana Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi dalam upaya pemulihan ekonomi melalui program Lorong Wisata di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dinamika kolaborasi dalam upaya pemulihan ekonomi melalui program Lorong Wisata di Kota Makassar.

2. Untuk Mengetahui Tindakan kolaborasi dalam upaya pemulihan ekonomi melalui program Lorong Wisata di Kota Makassar.
3. Untuk Mengetahui Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi dalam upaya pemulihan ekonomi melalui program Lorong Wisata di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengembangan pengetahuan tentang kolaborasi pemerintah dalam penanganan pemulihan ekonomi melalui program Lorong wisata serta penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lainnya.

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dengan menghadirkan manfaat praktis terhadap disiplin ilmu pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji topik yang sama. Berikut merupakan matriks penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

No	Nama & Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Hasna & Darumurti, 2023	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob Di Kota Pekalonga	Bentuk Collaborative Governance yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan LSM BINTARI Foundation diwujudkan kedalam beberapa program seperti kajian dan riset, pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana dan MCK Adaptif di wilayah Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara. Program tersebut telah berhasil mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh banjir rob. Meskipun demikian, adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki mengakibatkan bentuk program mitigasi banjir rob belum merata ke seluruh wilayah Kota Pekalongan.
2	M. & Senaen, 2020	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengembangan Desa Wisata	Kolaborasi sinergi yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya dengan fokus utama mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir. Kolaborasi ketiga pihak memberikan warna baru terhadap pariwisata di Surabaya, Kota Metropolitan memiliki wisata berkonsep adventure land dengan

No	Nama & Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			<p>melibatkan pemberdayaan masyarakat menjadi pencapaian terbaik Pemerintah Kota Surabaya. Namun, masih ada pengembangan yang harus terus diupayakan dalam pengembangan wahana dan fasilitas Romokalisari Adventure Land agar dapat meningkatkan daya tarik wisatawan dan menjadikan Romokalisari Adventure Land sebagai tempat wisata berkelanjutan serta dapat dinikmati dalam jangka panjang di Kota Surabaya.</p>
3	Jonatan & Bahri, 2024)	Strategi Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemulihan Ekonomi Melalui Program Makassar Recover Makassar City Government	<p>Strategi utama yang dijalankan ada tiga tahapan, yaitu Imunitas Kesehatan, Adaptasi Sosial, Pemulihan Ekonomi. Dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam pemulihan ekonomi melalui sektor UMKM, dinilai sudah berjalan dengan baik, hal itu ditandai dengan adanya bantuan sosial tunai maupun non tunai yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas UMKM, selain itu adanya berbagai pelatihan dasar bagi para pelaku UMKM agar bisa lebih kreatif dan produktif dalam mengembangkan usaha UMKM.</p>
4	Yahya et al., 2024	<i>Collaborative Governance</i> dalam Penanganan Kemacetan Di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Collaborative Governance mampu mengurangi tingkat kemacetan di Kota Surabaya. Berdasarkan hasil analisis terhadap 4 dimensi menunjukkan adanya berbagai upaya kolaborasi untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan</p>

No	Nama & Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			<p>lalu lintas. Meskipun demikian, program kerja yang dilaksanakan hanya berdasarkan perintah, instruksi, dan kebijakan pimpinan sesuai koridor yang dibuat oleh Kepala daerah karena jelas bentuk dokumen kerja sama antar stakeholder dalam penanganan kemacetan. Kondisi ini dapat mengancam keberlanjutan pelaksanaan Collaborative Governance apabila terjadi pergantian kepemimpinan.</p>

B. Konsep *Collaborative Governance*

a. *Collaborative Governances*

Istilah *Collaborative Governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program public (Cahyono et al., 2023)

Ansell dan Gash (2007) dalam (Jonatan & Bahri, 2024) mengembangkan kerangka konsep kolaborasi dengan pendekatan berbasis sistem yang kemudian menemukan konsep “*collaborative governance*” (kolaborasi pemerintahan) yang didefinisikan sebagai berikut

“a governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal,

consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public or manage public programs or assets”

Collaborative Governance berdasarkan kutipan di atas dapat diartikan sebagai susunan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan stakeholder non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus dan deliberatif, yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola kebijakan program atau mengelola suatu asset (Rahmadanti & Fitriana, 2023).

Adapun pendapat dari Emerson et al. (2012) yang menghilangkan penekanan pada pemerintah sebagai penggerak kolaborasi dan menggambarkan “rezim pemerintahan kolaboratif (*Collaborative Governance regime*)” sebagai “*Process and structures of public policy decision making and management that engage people constructively across the boundaries of public agencies, levels of government, and/or the public, private and civic spheres in order to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished*” (dalam Morris et al., 2015: 19).

Kolaborasi yaitu suatu kegiatan yang secara fundamental terletak pada pengelolaan jaringan sosial. Jaringan sosial yakni hubungan simpul-simpul komunikasi para pemangku kepentingan. Atas pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa teori kolaborasi yakni analisis dari proses tata kelola dengan sudut pandang pada jaringan sosial. Model tata kelola kolaboratif mengharuskan seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam dialog, dimana para pemangku

kepentingan ini mewakili diri mereka sendiri dalam mengungkapkan kepentingannya (Yuliska et al., 2024).

Fokus *Collaborative Governance* ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus diantara para pemangku kepentingan. *Collaborative Governance* menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik. Menurut O'Leary dan Bingham (Bopeng et al., 2023) kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian. Pendapat ini didukung oleh Bardach (Bopeng et al., 2023) yang mendefinisikan collaboration sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang bekerja sama ditujukan untuk meningkatkan "public value" ketimbang bekerja sendiri-sendiri.

Berbagai kerjasama antar stakeholder dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dimasyarakat merupakan suatu upaya karena keterbatasan akan sumberdaya dalam menanganinya. Istilah kerjasama antar stakeholder yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat dapat diartikan sebagai *Collaborative Governance*.

Innes dan Booher dalam (Thesa et al., 2024) memberikan pernyataan bahwa pendekatan *Collaborative Governance* menjadi relevan untuk dikembangkan sebab pendekatan kolaboratif menjelaskan bahwa sistem kolaborasi akan mengenalkan mengenai berbagi jenis konsep yang mawadahi

suatu proses terutama antar pemerintah dengan swasta dan masyarakat dimana adanya kepentingan dan kebutuhan yang beragam untuk dipecahkan melalui sebuah dialog dan kolaborasi. Selanjutnya menurut Ratner, terdapat tiga fokus fase didalam *Collaborative Governance* yang merupakan proses kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

a) *Identifying Ostacles and Opportunities* (Fase Mendengarkan)

Pada fase ini, pemerintah dan stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi yakni swasta dan masyarakat akan melakukan identifikasi mengenai hambatan-hambatan yang akan mereka hadapai selama proses kolaborasi dilakukan. Setiap stakeholder yang terlibat akan saling menjelaskan permasalahan dan stakeholder yang lain akan mendengarkan setiap permasalahan yang dijelaskan. Setelah menjelaskan permasalahan masing-masing kemudian mereka akan memperhitungkan mengenai peluang dalam penyelesaian setiap masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya seperti solusi apa yang akan dilakukan jika permasalahan tersebut betul terjadi. Setiap stakeholder memiliki kewenangan yang sama dalam menentukan kebijakan pada setiap permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya dan kemudian mempertimbangkan peluang berupa pencapaian yang dapat dihasilkan dari masing-masing pihak yang terlibat.

b) *Debating Strategies For Influence* (Fase Dialog)

Pada fase dialog ini, stakeholder yang terlibat didalam kolaborasi akan melakukan dialog ataupun diskusi mengenai hambatan yang telah dijelaskan didalam fase pertama. Dialog yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder meliputi dialog mengenai langkah yang akan dipilih sebagai langkah yang paling

efektif untuk memecahkan permasalahan. Setelah itu, mereka akan berbicara mengenai pihak-pihak yang nantinya akan mampu mendukung penyelesaian permasalahan dalam kolaborasi.

c) *Planning Collaborative Actions (Fase Pilihan)*

Pada tahap terakhir ini, stakeholder yang terlibat akan melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah dibicarakan pada tahap sebelumnya, seperti langkah awal yang akan dilakukan dalam berkolaborasi. Setelah itu, mengidentifikasi pengukuran setiap proses yang dilakukan dan menentukan langkah untuk memastikan bahwa kolaborasi tersebut agar berjalan dalam jangka panjang.

Emerson & Tina (2012) menjelaskan bahwa proses kolaborasi terdiri dari: (1) dinamika kolaborasi, (2) tindakan kolaborasi, serta (3) dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi:

a. Dinamika Kolaborasi

Di dalam proses kolaborasi, dinamika kolaborasi adalah bagian yang paling penting. Pengungkapan seberapa baik pelaksanaan kolaborasi terdapat pada dinamika, yang terdapat penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan tindakan bersama.

a) Penggerakan Prinsip Bersama

Beberapa hal seperti dialog tatap-muka atau melalui perantara teknologi adalah cara menggerakkan prinsip bersama. Di dalamnya terdapat penegasan kembali tujuan bersama, pembentukan dan pengembangan prinsip-prinsip bersama yang sering diungkap dalam berbagai perspektif aktor. Oleh karena itu,

penyatuan prinsip merupakan inti dari hal ini. Di dalam penggerakan prinsip bersama, terdapat beberapa komponen sebagai berikut:

1) Pengungkapan

Proses mengungkap kepentingan, nilai-nilai aktor, serta upaya konstruksi kepentingan bersama. Pengungkapan dapat dianalisis dari mengapa aktor tersebut bergabung ke dalam kolaborasi (Nurchahyany et al., 2022)

2) Deliberasi

Deliberasi terbentuk dengan adanya diskusi bersama, keterbukaan berpendapat, menyatakan ketidaksetujuan, diskresi, sehingga membentuk “kualitas deliberasi”. Deliberasi pada kolaborasi telah terbentuk dengan adanya diskusi bersama. Seluruh aktor menyatakan bahwa diskusi yang berjalan terbuka, artinya terdapat dorongan untuk mengemukakan pendapat, terlihat dari presentasi masing-masing terhadap pencapaian kegiatan yang telah dilakukan (Ilham & Bonjol, 2024)

3) Determinasi

Merupakan serangkaian tindakan penetapan bersama akan tujuan berkolaborasi. Determinasi terdapat dua jenis, yaitu primer dan substantif. Determinasi primer lebih kepada pembuatan keputusan prosedural (teknis kolaborasi, penetapan agenda, jadwal pertemuan, kelompok kerja). Sedangkan determinasi substantif lebih kepada pembentukan kesepakatan bersama, rekomendasi final tindakan kolaborasi ke depan.

b) Motivasi Bersama

Motivasi bersama merupakan penguatan siklus yang terdiri dari elemen kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen.

Di dalam motivasi bersama, terdapat beberapa komponen sebagai berikut:

1) Kepercayaan Bersama

Diperlukan usaha terus-menerus dari interaksi untuk mengetahui (discover) satu sama lain, dan membuktikan kelayakan untuk dipercaya. Selain itu, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi seperti hubungan saling tergantung, hubungan antar aktor di luar kolaborasi, pengalaman melakukan kolaborasi dengan aktor lain yaitu apakah dapat memberi kepercayaan atau malah memberi dampak negatif, budaya dari aktor, adanya hubungan individu pada antar aktor, atau terdapat peran lain dari individu tersebut sehingga mempengaruhi hubungan kepercayaan dengan aktor lain.

2) Pemahaman Bersama

Maksudnya sesama aktor saling mengerti dan menghargai perbedaan. Pemahaman bersama menuju pada kualitas interaksi interpersonal individu dan organisasi. Pembentukan pemahaman bersama sering dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah terbentuk di dalam kolaborasi.

3) Legitimasi Internal

Merupakan adanya pengakuan berasal dari internal kolaborasi, yaitu bahwa aktor-aktor kolaborasi dapat dipercaya atau kredibel dalam menjalankan tugas dan perannya. Legitimasi internal, pemahaman bersama, dan kepercayaan bersama merupakan tiga elemen yang saling terkait erat satu sama lain dalam komponen motivasi bersama, sehingga untuk elemen selanjutnya, yaitu

komitmen juga sedikit banyak dipengaruhi oleh kualitas tiga elemen ini (Arma, 2023)

c) Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

Yang dimaksud adalah berbagai hasil dari elemen-elemen lintas fungsional untuk menghasilkan tindakan yang efektif, karena adanya kapasitas memadai dari aktor.

1) Prosedur dan Kesepakatan Bersama

Meliputi aturan-aturan umum, protokol-protokol kegiatan, dan aturan untuk membuat keputusan, yang semua itu dapat diwujudkan melalui kesepakatan informal dan formal. Namun, pada kolaborasi yang kompleks, dan berdurasi panjang, dibutuhkan lebih pada kesepakatan yang formal, seperti membentuk landasan hukum kolaborasi.

2) Kepemimpinan (oleh pemimpin kolaborasi)

Mempunyai peran mutlak dalam proses kolaborasi. Berbagai perannya adalah (1) sebagai pihak yang menggali dukungan untuk kolaborasi, (2) menginisiasi pertemuan, (3) fasilitator dan mediator, (4) representasi dari aktor dan kolaborasi secara keseluruhan, (5) pendistributor pengetahuan, (6) mendorong penggunaan teknologi dalam kolaborasi, serta (7) melakukan advokasi pada publik. Berdasarkan, terdapat pemimpin telah melakukan inisiatif penjadwalan pertemuan bersama dengan mengundang seluruh aktor,

walaupun diakui bahwa terdapat hambatan rencana pembuatan kegiatan rutin bersama, karena peran ganda pemimpin dan kesibukan masing-masing aktor.

3) Pengetahuan

Merupakan segala informasi yang diperlukan oleh aktor untuk berpartisipasi dalam proses kolaborasi. Pengetahuan adalah informasi yang dipahami oleh aktor, sehingga berguna bagi mereka. Pengetahuan yang tidak didistribusikan dengan baik akan dapat membingungkan aktor kolaborasi, karena kerancuan informasi yang di dapat. Pada kolaborasi, pengetahuan sebagian besar terdistribusikan pada pertemuan bersama. Di dalam pertemuan tersebut, terdapat penyampaian hasil-hasil capaian dari masing-masing aktor, kemudian diskusi dan pembuatan keputusan bersama yang merupakan pengetahuan penting dan dibutuhkan.

4) Sumber Daya

Sumber daya adalah: (1) pendanaan finansial, (2) pembagian waktu dan peran, (3) dukungan teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan, (4) saling melakukan pendampingan, (5) kebutuhan keahlian analisis kolaborasi, dan (6) implementor di lapangan, serta (7) kebutuhan ahli.

a. Tindakan Kolaborasi

Tindakan-tindakan dalam kolaborasi pada praktiknya sangat beragam, dan merupakan cerminan daripada dinamika kolaborasi. Apapun tindakan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan/event atau diskusi dan sebagainya, dan baik buruknya dapat dilihat dari pembangunan dan pemahaman benar akan

dinamika kolaborasi oleh para aktor dan individu kolaborasi. Kemudian, hasil daripada tindakan ini secara langsung membawa dampak sementara yang mengarah kembali pada dinamika kolaborasi, dan dampak jangka panjang.

b. Dampak dan Adaptasi

Dampak yang dimaksud adalah dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. Karakteristik dampak ada yang diharapkan, yang tidak diharapkan, serta tidak terduga. Dampak yang diharapkan adalah “small-wins” yaitu hasil-hasil positif yang terus berlangsung dan memberikan semangat para aktor. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan seperti kendala-kendala dalam pelaksanaan kolaborasi. Dampak tidak terduga juga dapat muncul secara langsung maupun tidak pada proses kolaborasi (Dewi, 2019).

Berbagai dampak tersebut menghasilkan umpan balik, yang kemudian di adaptasi oleh kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud adalah bagaimana kolaborasi menyikapi umpan balik dari masing-masing aktor yang ada. Adaptasi yang baik adalah yang sekiranya dapat dilakukan oleh seluruh aktor kolaborasi, artinya tidak ada pengaruh kepentingan organisasi di atas kolaborasi, sehingga menyebabkan terjadinya usaha mengambil manfaat kolaborasi secara lebih untuk kepentingan organisasi sendiri. Adaptasi harus berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan utama untuk dirubah di dalam kolaborasi, sehingga hal tersebut dapat menjaga kemajuan kolaborasi (Sayuti et al., 2022).

Berdasarkan beberapa pendekatan ahli di atas, dijelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan pemerintah yang pelaksanaannya tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Adanya kolaborasi dalam program Lorong Wisata disebabkan karena kerumitan dan ketergantungan antar satu lembaga dengan lembaga yang lainnya (Saadah et al., 2023). Program Lorong Wisata tidak bisa dijalankan oleh satu lembaga saja sebab penanganan yang dilakukan meliputi bidang yang berbeda-beda, karena penanganan yang dilakukan berbeda-beda maka pelaksanaannya juga dilakukan oleh beberapa lembaga terkait dengan bidang dan kewenangan masing-masing, maka dapat diketahui ada lima tahap dalam proses kolaborasi meliputi:

a) *Institutional Design*

Desain kelembagaan merujuk pada protokol dasar dan aturan dasar untuk kolaborasi, yang sangat penting untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif. Akses ke proses kolaboratif itu sendiri mungkin merupakan masalah desain yang paling mendasar (Hasna & Darumurti, 2023)

b) *Starting Condition Power Resource, Knowledge Asymmetries*

Ketidakseimbangan / kekuasaan antara para pemangku kepentingan adalah masalah yang sering dicatat dalam tata kelola kolaboratif (Rayhannisa & Pambudi, 2024)). Jika beberapa pemangku kepentingan tidak memiliki kapasitas, organisasi, status, atau sumber daya untuk berpartisipasi, atau untuk berpartisipasi secara setara dengan pemangku

kepentingan lainnya, proses tata kelola kolaboratif akan rentan terhadap manipulasi oleh aktor yang lebih kuat.

c) *Incentives for and Constraints on Participation*

Insentif untuk berpartisipasi mengingat sifat partisipasi sukarela yang besar, sangat penting untuk memahami insentif yang harus dimiliki oleh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam tata kelola kolaboratif dan faktor-faktor yang membentuk insentif tersebut. Insentif meningkat ketika pemangku kepentingan melihat hubungan langsung antara partisipasi mereka dan hasil kebijakan yang konkret, nyata, dan efektif (Fatmawati & Nur Muqni Melliyani Harahap, 2024)

d) *Prehistory of Cooperation or conflict (Initial Trust Level)*

Para pemangku kepentingan sangat saling bergantung, tingkat konflik yang tinggi sebenarnya dapat menciptakan insentif yang kuat untuk tata kelola kolaboratif. Kebuntuan kebijakan sebenarnya dapat menciptakan dorongan kuat untuk tata kelola kolaboratif. Situasi seperti itu sering terjadi dalam konteks manajemen sumber daya di mana kebuntuan itu sendiri membebankan biaya yang serius di kedua sisi perselisihan. dan pengambilan keputusan, dengan setiap langkah memiliki beberapa tahap. Model tahap kolaborasi adalah penting untuk menarik perhatian pada strategi kolaborasi yang berubah saat konteks berubah.

e) *Facilitative Leadership*

Kepemimpinan sangat penting untuk menetapkan dan mempertahankan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan,

memfasilitasi dialog, dan mengeksplorasi keuntungan bersama. (Vangen & Huxham, 2003) berpendapat bahwa kepemimpinan penting untuk merangkul, memberdayakan, dan melibatkan para pemangku kepentingan dan kemudian memobilisasi mereka untuk memajukan kolaborasi. Fasilitasi tidak mengganggu pada hak prerogatif manajemen para pemangku kepentingan; peran seorang fasilitator adalah memastikan integritas proses pembangunan konsensus itu sendiri. Mediasi meningkatkan peran intervensi pihak ketiga dalam perincian substantif perundingan ketika para pemangku kepentingan tidak efektif dalam mengeksplorasi kemungkinan menang-menang.

f) *Outcomes*

Hasil yang terjadi setelah pelaksanaan jangka pendek dan berkelanjutan, dalam penelitian ini akan berfokus pada proses kolaborasi yang dilakukan oleh setiap stakeholder dalam Program Lorong Wisata

C. Program Lorong Wisata

1. Konsep Program

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau

sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan (M. & Senaen, 2020).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), program adalah konsep prinsip dan kegiatan (dalam penyelenggaraan negara, perekonomian, dll) yang akan dilaksanakan. Jika membahas secara konsep, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa program merupakan instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh badan/organisasi utama yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk mencapai keinginan dan tujuan serta menerima alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh organisasi masyarakat (Yahya et al., 2024)

2. Konsep Lorong Wisata

Menurut perspektif kemandirian lokal, pembangunan harus dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan mengacu pada karakteristik khusus mereka (Gumanti & Herinanto, 2024). Arianto dan Eliza (2013) berpendapat bahwa, selain memanfaatkan sumber daya, proses yang terjadi di lingkungan lokal harus mendapatkan perhatian khusus. Mereka harus menjadi dasar pembangunan dan penguatan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka wujud kemandirian lokal di masyarakat tercipta jika masyarakat mampu memanfaatkan segenap potensi atau sumber daya yang ada disekitarnya. Salah satu wujud kemandirian lokal

yang tercipta dari upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pemberdayaan kawasan lorong di Kota Makassar. Ratusan lorong di kota Makassar telah mengalami revitalisasi dan pembenahan dengan berbagai program yang menyentuh seluruh aspek kehidupan warga lorong. Penataan lorong yang diprogramkan Pemerintah Kota Makassar dan diberi nama Lorong Wisata merupakan serangkaian bentuk pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga lorong yang menjadi tempat tinggal mereka.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Peternakan (KP3) Kota Makassar, terdapat 7.538 lorong yang dihuni sekitar 535.000 orang. Untuk itu program Lorong Wisata merupakan program strategis pemerintah kota dalam menata dan memberdayakan masyarakat Makassar. Walikota Makassar membuat program Lorong Wisata yang diluncurkan pada 17 Agustus 2022 yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI dan mengharapkan program lorong wisata akan menjadi program unggulan yang akan mengenalkan Kota Makassar pada dunia serta berbagai program strategis dari masing-masing bagian diharapkan mampu disinkronkan agar menjadi lebih kompleks (Rawali & Ramadhani, 2024)

Walikota Makassar membentuk Dewan Lorong yang disingkat D'Lor, mereka bertugas di Lorong Wisata, sebagai motivator bagi warga yang ada di lorong, menjaga properti lorong dan mensosialisasikan program pemerintah Kota Makassar.

Adapun tujuan lorong wisata yaitu :

- 1) Program ini diharapkan sebagai bentuk upaya mendorong pemulihan ekonomi;
- 2) Membangun kesadaran/perilaku warga akan pentingnya kebersihan dan keindahan lorong;
- 3) Mengaplikasikan ide kreatifitas warga sekitar;
- 4) Mengenalkan Makassar pada Dunia.

Pembentukan Program Lorong Wisata dibuat atas dasar Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 dimana program ini merupakan perwujudan kebangkitan ekonomi masyarakat di kota Makassar setelah pandemi COVID-19. Setiap kelurahan di kota Makassar sejak awal peluncuran program Lorong Wisata tahun 2022 telah mengupayakan untuk membuat 7 (tujuh) Lorong Wisata yang merupakan target dari Walikota Makassar yaitu membuat tujuh Lorong Wisata di setiap kelurahan di Kota Makassar dimana pada setiap Lorong Wisata memiliki penanggung jawab masing-masing.

Sasaran utama dari Program Lorong Wisata di Kota Makassar mencakup beberapa kelompok berikut:

1. Masyarakat Lokal

Program ini menargetkan warga setempat, khususnya yang tinggal di sekitar lorong wisata, untuk diberdayakan melalui pelatihan keterampilan, pembukaan peluang usaha, dan peningkatan partisipasi dalam pengelolaan destinasi wisata.

2. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Para pelaku UMKM menjadi salah satu sasaran utama untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal, seperti melalui penjualan produk berbasis kearifan lokal, makanan khas, kerajinan tangan, dan jasa wisata lainnya.

3. Sektor Swasta dan Pelaku Usaha Besar

Melalui program ini, sektor swasta diundang untuk berkolaborasi dalam bentuk investasi, dukungan pelatihan, atau promosi untuk pengembangan kawasan lorong wisata.

4. Pemerintah Daerah dan Stakeholder Lainnya

Sebagai pihak pengelola, pemerintah daerah menjadi sasaran untuk memperkuat koordinasi, perencanaan, dan evaluasi program guna memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya dalam jangka panjang.

Manfaat Lorong Wisata yaitu sebagai basis ekonomi kebangkitan yang di dalamnya berisi edukasi kesejahteraan dan menanamkan mental mandiri pada warga pada setiap lorong serta local influencer. Lorong Wisata diharapkan mampu menempatkan Kota Makassar sebagai salah satu daerah destinasi bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara dengan beraneka ragam kulinernya seperti kacang disco, kerupuk bawang, bakso, gado-gado, mie kuah dan mie goreng. Sedangkan potensi tanaman yaitu tanaman hias, apotik hidup/sayuran, tanaman buah dan juga membuat mural dengan hiasan tanaman (Saharuna & Rahman, 2024)

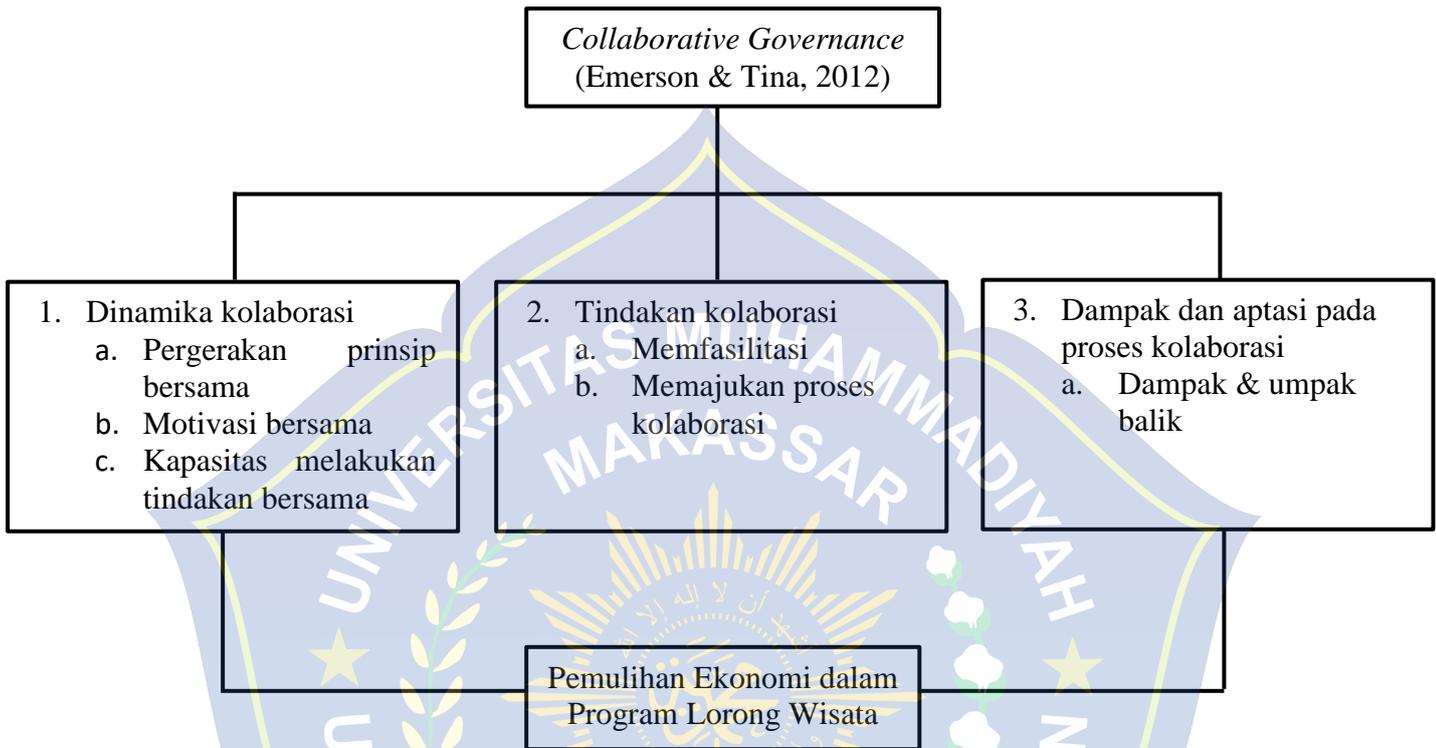
Tak hanya itu, Lorong Wisata juga mengembangkan potensi kerajinan tangan daur ulang seperti tempat tisu, pot bunga, sandal dan kerajinan lainnya dengan bahan daur ulang.

D. Kerangka Konsep

Berbagai konsep dari teori yang digunakan dalam penelitian dan hubungannya dengan perumusan masalah didasarkan pada kerangka pikir. Kolaborasi adalah upaya untuk menggabungkan semua sektor, baik pemerintahan maupun non-pemerintah, untuk mengelola, menata, dan mengatur semua urusan bersama untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Penelitian ini akan membahas tentang *Collaborative Governance* Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Melalui Program Lorong Wisata Di Kota Makassar. Dimana *Collaborative Governance* memiliki tiga tahap, yaitu a) Dinamika Kolaborasi, b) Tendakan-tindakan kolaborasi, c) Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi. (Balogh, dkk.2012).

Berdasarkan latar belakang dan teori-teori di atas maka kerangka penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan berikut ini dengan melihat beberapa indikator pada *Collaborative Governance* Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Melalui Program Lorong Wisata Di Kota Makassar. (Emerson & Tina, 2012)

Kerangka Konsep



Gambar 2. 1 Kerangka Konsep *Collaborative Governance*

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah *Collaborative Governance* dalam Upaya Pemulihan Ekonomi melalui Program Lorong Wisata di Kota Makassar dimana nilai pedoman yang dijadikan indikator yaitu :

1. Dinamika Kolaborasi
2. Tindakan Kolaborasi
3. Dampak Dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian ini, maka dapat dikemukakan deskripsi fokusnya yaitu :

1. Dinamika kolaborasi merupakan penggerak penting dalam proses kolaborasi dan memiliki sifat yang beubah-ubah. Kolaborasi yang baik terdapat dinamika. Didalam dinamika kolaborasi berfokus pada keterlibatan prinsip, motivasi bersama dan kapasitas dalam Upaya Pemulihan Ekonomi melalui Program Lorong Wisata di Kota Makassar
2. Tindakan Kolaborasi merupakan tindakan yang dilakukan dalam proses kolaborasi seperti tindakan memajukan proses kolaborasi dan kegiatan dilapangan guna membantu dalam Upaya Pemulihan Ekonomi melalui Program Lorong Wisata di Kota Makassar
3. Dampak dan Adaptasi pada Proses Kolaborasi merupakan dampak yang ditimbulkan dari proses kolaborasi. Dampak tersebut dapat menghasilkan umpan balik yang kemudian di adaptasi dalam proses kolaborasi dalam Upaya Pemulihan Ekonomi melalui Program Lorong Wisata di Kota Makassar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih 2 (bulan) bulan. Lokasi penelitian adalah tempat untuk mengumpulkan dan mencari data serta berinteraksi dengan subjek penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh penulis sebagai tempat untuk mendapatkan data dari suatu penelitian yang sedang diteliti sehingga data yang didapatkan lebih akurat. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Dinas Dinas Pariwisata, dan Kelurahan Tello Baru (Lorong Wisata Sidney).

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penelitian kali ini, penulis memilih untuk menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk memahami *Collaborative Governance* dalam Upaya Pemulihan Ekonomi melalui Program Lorong Wisata di Kota Makassar. Penggunaan lebih dari satu pendekatan pengumpulan data memungkinkan evaluator menggabungkan kegiatan dan kebenaran dari suatu sumber data.

2. Tipe Penelitian

Pada tipe dalam penelitian ini adalah fenomenologi yang berfokuskan pada kolaborasi *stakeholder* dalam pemulihan perekonomian. Tipe penelitian fenomenologi ini digunakan karena penelitian ingin mendapatkan

Gambaran serta informasi yang sejelas-jelasnya mengenai dalam Upaya Pemulihan Ekonomi melalui Program Lorong Wisata di Kota Makassar.

C. Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil, wawancara *observasi* atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu: *Collaborative Governance* dalam Upaya Pemulihan Ekonomi melalui Program Lorong Wisata di Kota Makassar
2. Data Sekunder adalah data yang didapatkan penulis dari Buku-buku, Beberapa dokumen berupa laporan-laporan tertulis dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan aspek-aspek keberhasilan pemerintah dalam Upaya Pemulihan Ekonomi melalui Program Lorong Wisata di Kota Makassar.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini merujuk kepada individu atau aktor yang memiliki pemahaman mendalam tentang topik penelitian dan secara aktif terlibat dalam subjek yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi informan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Informan

No	Nama Jabatan	Nama	Pendidikan
1	Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Zulkifli Salam, S.IP	S1
2	Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Makassar	Zamhir Islamie Hatta, S.STP., MM	S2
3	Kabid Pengembangan Destrinasi Pariwisata Kota Makassar	Safaruddin, SS	S1
4	Kabid jalan dan jembatan Dinas PUPR	Noorhaq Alamsyah	S2
5	Kabid ketersediaan dan produksi pangan Dinas Ketahanan Pangan	Rahmaniar Syamsul, SP., M.Si	S2
6	Lurah Tello Baru	Isyan Qadar Djachrir, S.STP	S1
7	Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Sosial	Munirah, S.E	S1
8	Dewan Lorong Wisata	Ir. Muh. Ibrahim A. Azis, M.Si	S2
9	Masyarakat Kelurahan Tello Baru	Rudianto	SMA

Sumber: Data Sekunder, 2025

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang memegang peranan penting dalam suatu kegiatan penelitian. Sebab itu, pengumpulan data harus disusun secara sistematis agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Interview (wawancara) dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2017). Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini

diperlukan teknik wawancara, dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam bentuk yang disebut wawancara mendalam (in-depth interviewing). Teknik wawancara ini yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama pada penelitian lapangan. Tujuan wawancara untuk bisa menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan untuk merekonstruksikan beragam hal.

Selain itu, wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka (open-ended) dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur, guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh, lengkap, dan mendalam. Interview atau wawancara yang bertujuan untuk saling menyelami pandangan atau pikiran tentang sesuatu yang menjadi objek penelitian dengan kegiatan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi permasalahan yang menjadi bahan kajiannya. sehingga interaksi antara peneliti dengan orang yang memberikan informasi terkait permasalahan yang akan diteliti. Informan juga berhak mengetahui siapa sebenarnya si peneliti ini, dari tujuan hingga apa maksud dan kegunaan melakukan suatu penelitian. Proses dilakukan dengan cara yang terstruktur, dengan demikian tujuan wawancara yang dilakukan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya yang mengarah kedalaman informasi dan dilaksanakan secara informal.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan dan pencatatan data yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Menurut Mulyana Deddy, (2003) pengamatan dianggap cocok untuk meneliti bagaimana manusia berperilaku dan memandang realitas kehidupan mereka dalam lingkungan mereka yang biasa, rutin dan alamiah. Observasi Menurut Moleong J. Lexy (2007) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya.

c. Studi Literatur/Dokumen

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti (Sugiyono, 2017). Studi literatur merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh peneliti melalui pengkajian dan penelaahan terhadap catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen mengenai berbagai informasi dan hal yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan sumber data yang penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis gambar, peraturan, kebijakan, dan dokumen lain yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan tulisan ilmiah yang dapat memperkaya data yang dikumpulkan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2017).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Huberman dalam (Miles et al., 2014) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi

Reduksi data merupakan proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2017).

b. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data maka dapat membantu untuk memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Ia mengatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak diikuti dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya (Sugiyono, 2007). Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Makassar

Makassar merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini menempati posisi strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia. Dengan statusnya sebagai kota terbesar di wilayah ini dan kota terbesar keempat di Indonesia, Makassar memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai sektor. Kota ini berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, tempat berkembangnya industri, serta simpul utama transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Selain itu, Makassar juga menjadi pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, yang tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga masyarakat dari berbagai daerah di sekitarnya.

Gambaran umum tentang Kota Makassar dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek utama, yaitu kondisi geografis dan administrasi wilayah, serta kondisi demografi. Dari sisi geografis dan administrasi, Kota Makassar memiliki letak strategis yang mendukung perannya sebagai gerbang utama Kawasan Timur Indonesia, dengan akses yang mudah ke jalur transportasi internasional. Secara administrasi, wilayah ini terbagi menjadi beberapa kecamatan dan kelurahan, yang masing-masing memiliki karakteristik unik. Dari segi demografi, Kota Makassar merupakan tempat tinggal bagi populasi

yang terus berkembang dengan latar belakang budaya yang beragam,
menjadikannya pusat urbanisasi



yang dinamis. Kombinasi dari berbagai faktor ini menjadikan Makassar salah satu kota penting di Indonesia dengan peran yang tidak tergantikan dalam mendukung pembangunan nasional.

a. Kondisi Geografis dan Administrasi wilayah

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara $119^{\circ}24'17''38''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}8'6''19''$ Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan $0-2^{\circ}$ (datar) dan kemiringan lahan $3-15^{\circ}$ (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara $26,^{\circ}\text{C}$ sampai dengan 29°C .

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai “Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

Tabel 4. 1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Makassar, 2023

Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase
Mariso	1,82	1,04
Mamajang	2,25	1,28
Tamalate	20,21	11,5
Rappocini	9,23	5,25
Makassar	2,52	1,43
Ujung Pandang	2,63	1,5
Wajo	1,99	1,13
Bontoala	2,1	1,19
Ujung Tanah	4,4	2,5
Kepulauan Sangkarrang	1,54	0,88
Tallo	5,83	3,32
Panakukkang	17,05	9,7
Manggala	24,14	13,73
Biringkanaya	48,22	27,43
Tamalanrea	31,84	18,11
Kota Makassar	175,77	100

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2024)

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terluas yaitu 48,22 km² atau 27,43 dari luas wilayah Kota Makassar. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kepulauan Sengkarrang dengan luas wilayah 1,54 km² atau 0,88% dari luas wilayah Kota Makassar.

Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah:

- Batas Utara: Kabupaten Maros
- Batas Timur: Kabupaten Maros
- Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- Batas Barat: Selat Makassar

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- a) Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.
- b) Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakkukang, dan Rappocini.



Gambar 4. 1 Peta Kota Makassar

Sumber : <https://makassarkota.go.id/peta-wilayah-administrasi-kota-makassar/>

Pada Gambar di atas dapat dilihat bahwa Kota Makassar berbatasan dengan beberapa kabupaten dan selat. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Kota Makassar pada tanggal 1 September 1971 berubah namanya menjadi Kota Ujung Pandang setelah diadakan perluasan kota dari 21 km² menjadi 175,77 km². Namun kemudian, pada tanggal 13 Oktober 1999 berubah kembali namanya menjadi Kota Makassar. Kota Makassar merupakan kota internasional serta terbesar di Kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibu kota Negara Indonesia Timur Provinsi Sulawesi. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-20 (datar) dan kemiringan 3-150 (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km².

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Makassar

Kecamatan	Jenis Kelamin		Tahun
	Laki-Laki	Perempuan	2023
Mariso	29246	29484	58.730
Mamajang	28632	29661	58.293
Tamalate	94013	94419	188.432
Rappocini	73548	77065	150.613
Makassar	40771	41466	82.237
Ujung Pandang	12058	12793	24.851
Wajo	14512	14991	29.503
Bontoala	27409	27792	55.201
Ujung Tanah	18401	18344	36.745
Kepulauan Sangkarrang	7486	7495	14.981
Tallo	74581	73474	148.055
Panakkukkang	71640	72564	144.204
Manggala	79753	80713	160.466
Biringkanaya	107463	108357	215.820
Tamalanrea	52878	53384	106.262
Jumlah	732.391	742.002	1.474.393

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2024)

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Biringkanaya merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar 215.820 jiwa. Sedangkan Jumlah penduduk di Kecamatan Panakkukkang pada tahun 2023 tercatat 144.204 jiwa, yang terdiri atas 71.640 jiwa laki-laki dan 72.564 jiwa perempuan.

2. Dinas Pariwisata Kota Makassar

Dinas Pariwisata Kota Makassar merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani dan mengerakkan pembangunan sektor Pariwisata Kota Makassar yang disasarkan pada upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara serta mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kota Makassar.

Dinas Pariwisata Kota Makassar dulunya diberi nama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar, yang kemudian dipisah karena masing – masing berdiri sendiri. Muncullah nama baru menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar. Pada pertengahan tahun 2016, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kota Makassar memisahkan kembali Ekonomi Kreatif menjadi Dinas Pariwisata Kota Makassar sampai dengan sekarang.

Kantor Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Makassar bertempat di Jalan Urip Sumuharjo. Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kini Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Makassar memiliki keseluruhan staff berjumlah 97 orang dan di pimpin oleh kepala Dinas bernama Muhammad Roem, S.STP., M.Si. Terdapat 5 bidang didalamnya antara lain Bidang Sekretariat, , Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif. Dinas teknis yang menangani pariwisata, Dinas Pariwisata mempunyai tantangan yang sangat kuat untuk memenuhi tugas tersebut.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sekaligus mewujudkan visi Kota Makassar maka diperlukan upaya-upaya pengembangan segenap potensi dan sumber daya sebagai kekuatan internal yang harus saling bersinergi secara optimal dalam rangka peningkatan manajemen Dinas Pariwisata.

Visi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kota Makassar, merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang memiliki otoritas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Peran Dinas Pariwisata dan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi daerah Kota Makassar, oleh karena itu Dinas Pariwisata telah menetapkan Visi yaitu : “Terwujudnya Kota Makassar Sebagai Destinasi Pariwisata Dunia”.

Misi Sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pariwisata Kota Makassar sebagai berikut :

- a. Peningkatan Promosi dan pemasaran pariwisata yang terarah dan terencana.
- b. Penataan dan pengembangan usaha industri pariwisata dalam meningkatkan daya saing.
- c. Peningkatan kompetensi dan daya saing SDM pariwisata Kota Makassar dan Ekonomi Kreatif yang berstandar internasional.
- d. Pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.
- e. Peningkatan Kapasitas kelembagaan Dinas Pariwisata. .

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Dinas Pariwisata Kota Makassar, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu panjang. Sedangkan sasaran merupakan

penjabaran dari tujuan Dinas Pariwisata Kota Makassar, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Kedudukan Dinas Pariwisata Kota Makassar merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Pariwisata yang menjadi Kewenangan Daerah. Dinas Pariwisata dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas Pariwisata Kota Makassar mempunyai fungsi antara lain :

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata.
- 2) Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata.
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pariwisata.
- 5) Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang pariwisata.

- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kota Makassar, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3) Kepala Subbagian Keuangan
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri atas :
 - 1) Seksi Pengembangan Destinasi
 - 2) Seksi Industri Pariwisata
 - 3) Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, terdiri atas :
 - 1) Seksi Promosi
 - 2) Seksi Pemasaran
 - 3) Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelatihan Kepariwisata
 - 2) Seksi Fasilitasi Kompetensi dan Sertifikasi
 - 3) Seksi Kelembagaan Pariwisata
- f. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri atas:

- 1) Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya
- 2) Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek
- 3) Seksi Pembinaan Pelaku Kreatif.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KOTA MAKASSAR



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Makassar

3. Lorong Wisata Kelurahan Tello Baru

Lorong Wisata Sydney merupakan salah satu destinasi wisata baru di Kota Makassar yang berada di Kecamatan Panakukkang, Kelurahan Tello Baru. Tepatnya terletak di Kompleks Citra Tello RW 11 RT 6, lokasi ini berbatasan langsung dengan aliran Sungai Tello yang menjadi daya tarik utamanya. Kehadiran Lorong Wisata Sydney diharapkan dapat mendongkrak potensi pariwisata lokal sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat sekitar.

Lorong ini dinamakan "Sydney" karena inspirasinya adalah menciptakan suasana yang unik dan menarik seperti ikon kota Sydney di Australia, tetapi tetap mempertahankan sentuhan lokal khas Makassar. Pengunjung akan disuguhkan pengalaman unik melalui inovasi atraksi wisata yang memadukan keindahan alam, budaya lokal, dan konsep pariwisata berkelanjutan.

Daya tarik utama di Lorong Wisata Sydney adalah Cafe Terapung, sebuah konsep makan unik yang memadukan suasana romantis dan santai di atas perahu. Pengunjung dapat menikmati makanan khas Makassar sambil menyusuri aliran Sungai Tello yang asri.

Perahu yang digunakan memiliki berbagai kapasitas, yakni:

- ✓ Perahu berkapasitas 10 orang,
- ✓ Perahu berkapasitas 15 orang

- ✓ Perahu berkapasitas 20 orang.

Pengalaman makan di atas perahu ini tidak hanya menarik bagi wisatawan lokal, tetapi juga menjadi daya tarik bagi wisatawan luar kota maupun mancanegara. Setiap perjalanan dengan perahu dirancang untuk memberikan sensasi wisata yang nyaman dan aman, dengan pemandangan sekitar sungai yang menyegarkan. Aktivitas ini juga menjadi upaya untuk mengenalkan potensi Sungai Tello sebagai ikon wisata sungai di Kota Makassar.

Lorong Wisata Sydney tidak hanya menawarkan wisata kuliner, tetapi juga peluang untuk eksplorasi budaya lokal. Penduduk setempat dilibatkan secara aktif, baik dalam pengelolaan kafe maupun operasional perahu. Hal ini menjadikan lorong wisata ini sebagai model pariwisata berbasis masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi lokal.

Selain itu, keberadaan Lorong Sydney mendukung tujuan Kota Makassar dalam mengembangkan destinasi wisata urban yang berbasis lingkungan dan budaya. Lokasi ini juga strategis sebagai salah satu penghubung wisata sungai yang dapat diintegrasikan dengan lokasi wisata lainnya di Kota Makassar.

B. Bentuk Collaborative Governance dalam upaya pemulihan ekonomi di Kota Makassar

Pemulihan ekonomi melalui program Lorong Wisata memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti BUMN seperti PT. PLN Indonesia Power UPDK Tello, OPD, dan masyarakat Desa Tello Baru. Kolaborasi pemerintah

untuk memperbaiki ekonomi melalui Program Lorong Wisata memiliki beberapa tahapan antara lain:

- 1) Proses Lorong Wisata terdiri dari musrenbang antara pemerintah dan OPD, yang dihadiri oleh Kelompok Sadar Wisata, Kelompok Wanita Tani, dan Kelompok Budidaya Perikanan.
- 2) Selanjutnya, dibahas anggaran dasar koperasi dan ditetapkan nama dan alamatnya.
- 3) Terakhir, pemerintah memilih pengurus dan pengawas koperasi untuk menjalankan program.
- 4) Menetapkan simpanan wajib sebesar 50.000 rupiah per orang dan simpanan pokok sebesar 100.000 rupiah per orang setiap bulannya.
- 5) Menentukan masa jabatan lima (lima) tahun untuk pengawas dan pengurus.
- 6) Memberikan otoritas kepada pengurus untuk menandatangani Akta Pendirian. Selain itu, pengurus dapat mengajukan permohonan pengesahan Badan Hukum kepada pejabat yang berwenang.

Selanjutnya adalah kolaborasi PT. PLN Indonesia Power UPDK Tello dengan komunitas di Lorong Wisata Sydney, RTM RW. Tello Mandiri.

- a) Perjanjian kerja sama antara PT. PLN Indonesia Power UPDK Tello dan Pemerintah Desa dimulai dengan permintaan pemerintah desa agar PT. PLN Indonesia Power UPDK Tello membangun penyaringan air untuk menjaga kehidupan ikan di RTM RW. Tello Mandiri.
- b) PT. PLN Indonesia Power UPDK Tello kemudian membangun pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik.



Sumber : <https://ppid.makassarkota.go.id/home/detailberita/558>

Gambar 4. 3 kolaborasi yang dilakukan oleh OPD, swasta dan masyarakat

Stakeholder yang terlibat kolaborasi pada program Lorong Wisata ini, selain dari OPD yang terlibat sebelum pelaksanaannya proses ini juga adanya pihak ketiga dari swasta khususnya dalam penata lorong dari Bank Indonesia, PT. PLN Indonesia Power UPDK Tello sebab memiliki catatan sejarah dalam pengendali inflasi di Kota Makassar. Kolaborasi itu sendiri mencakup beberapa komponen yang mencakup dari pihak pemerintah adalah Pemkot, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Parwisata, Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Lingkungan Hidup.



MAKASSAR, MEDIATA.ID — Bank Indonesia siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Makassar untuk menyukseskan sejumlah program, utamanya Lorong Wisata.

Sumber : <https://ppid.makassarkota.go.id/home/detailberita/558>

Sedangkan untuk pihak swasta dalam penyelenggaraan Program Lorong Wisata adalah Bank Indonesia. Setelah koordinasi yang dilakukan oleh seluruh OPD yang terkait kolaborasi dan juga dengan pihak swasta, selanjutnya adalah program tersebut diimplementasikan kepada masyarakat, melalui Kepala Camat turun kepada Kepala Lurah sebagai ketua dilokasi penyelenggaraan program itu dilaksanakan. Hal ini dilakukan oleh kepala Kelurahan melalui Ketua RT dan Dewan Lorong. Koordinasi ini untuk mempermudah dalam bekerjasama dan melaksanakan program Lorong Wisata di Kota Makassar.

Dalam proses kolaborasi ini awalnya adalah perencanaan yang dilakukan oleh seluruh para SKPD dengan Walikota dalam hal ini termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, dari Swasta terdiri dari Bank Indonesia, PT PLN Indonesia Power UPDK Tello , sedangkan dari masyarakat yaitu Kepala Lurah, Ketua RT dan Dewan Lorong. Dari hasil rapat tersebut akhirnya dapat ditentukan pihak siapa saja yang ikut terlibat baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketika semua sudah bertemu dalam forum dan melakukan rapat untuk semua pihak yang terlibat baik dinas, swasta, akhirnya ada hasil sebagai penentu yang menangani program Lorong Wisata di Kota Makassar.

C. Hasil Penelitian

Pada bab ini dijelaskan kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata berdasarkan tiga proses kolaborasi Emerson & Tina (2012): a) Dinamika Kolaborasi, b) Tindakan Kolaborasi, dan c) Dampak serta Adaptasi dalam proses kolaborasi. Ketiga proses tersebut menjadi dasar untuk menganalisis pembahasan dalam bab ini, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Dinamika Kolaborasi

Dalam proses kolaborasi, dinamika kolaborasi menjadi elemen paling krusial yang menentukan keberhasilan. Di Lorong Wisata Sydney, Kelurahan Tello Baru, dinamika kolaborasi tercermin dari bagaimana berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku usaha, bergerak bersama dengan prinsip yang disepakati, motivasi kolektif untuk memajukan pariwisata,

serta kapasitas untuk melaksanakan tindakan secara terpadu. Pengelolaan kafe terapung dan optimalisasi potensi Sungai Tello sebagai destinasi wisata adalah hasil nyata dari penggerakan prinsip bersama, di mana setiap pihak berkontribusi sesuai peran dan tanggung jawabnya, menciptakan kolaborasi yang harmonis dan berkelanjutan.

a. Pergerakan Prinsip Bersama

Pergerakan prinsip bersama dalam sebuah proses kolaborasi merupakan elemen yang berlangsung secara berkelanjutan, di mana setiap pihak yang terlibat berupaya mencapai tujuan yang sama secara kolektif. Kolaborasi semacam ini menuntut keselarasan visi dan komitmen bersama agar setiap langkah yang dilakukan secara sinergis dapat mengarahkan pada pencapaian tujuan yang telah disepakati.

Pergerakan prinsip bersama yang dilakukan dalam kolaborasi oleh para informan yang terkait, dilihat dari wawancara dibawah ini, sebagaimana diungkapkan oleh informan inisial ZS (Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) menatakan bahwa :

“dalam Program Lorong Wisata, kolaborasi adalah elemen utama. Kami di Dinas Pariwisata Kota Makassar terus berupaya menyatukan visi antara pemerintah, komunitas lorong, dan pelaku usaha lokal. Visi bersama ini adalah menjadikan lorong-lorong sebagai destinasi wisata berbasis kearifan lokal, sekaligus penggerak ekonomi masyarakat" (hasil wawancara 22 November 2024).

Sama hal dengan pernyataan informan ZIH (Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Makassar) yang menyatakan *Collaborative Governance* dalam konteks Lorong Wisata menuntut adanya kesetaraan di antara semua pihak yang terlibat.

“jadi disini kolaborasi semua pihak menuntut adanya kesetaraan yang terlibat. Tidak hanya pemerintah yang mengambil keputusan, tetapi juga mendengar masukan dari masyarakat dan mitra usaha. Kami yakin bahwa keputusan kolektif lebih mampu menciptakan solusi yang relevan dengan kebutuhan lokal.” (hasil wawancara 25 November 2024).

Menurut informan SF (Kabid Pengembangan Destrinasi Pariwisata Kota Makassar), mengatakan bahwa :

“Pemulihan ekonomi melalui Program Lorong Wisata tidak dapat dicapai hanya dengan intervensi sesaat. Kami memastikan bahwa kolaborasi yang terjalin bersifat berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Semua pihak, termasuk masyarakat lorong, akademisi, dan sektor swasta, maupun media terlibat secara aktif dalam setiap tahapan” (hasil wawancara 9 Desember).



MAKASSAR,- Pemkot Makassar berkolaborasi dengan media Berite Kota Makassar (BKM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan menguatkan branding program Lorong Wisata (Longwis).

Sumber : <https://ppid.makassarkota.go.id/home/detailberita/1550>

Gambar 4. 4 Kolaborasi Pemkot makassar dengn Media Berita

Berdasarkan hasil wawancara informan ZS, ZIH dan SF Program Lorong Wisata di Kota Makassar didasarkan pada prinsip kolaborasi yang menyeluruh dan berkesinambungan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam setiap tahap implementasinya. Kolaborasi ini bertujuan

untuk mewujudkan lorong-lorong sebagai destinasi wisata berbasis kearifan lokal sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. visi bersama antara pemerintah, komunitas lorong, dan pelaku usaha lokal menjadi elemen utama dalam mendukung keberhasilan program ini. Prinsip *Collaborative Governance* juga menjadi landasan penting, dengan menekankan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat. Proses pengambilan keputusan tidak hanya didominasi oleh pemerintah, melainkan juga melibatkan masukan dari masyarakat dan mitra usaha. Pendekatan ini memastikan terciptanya solusi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. keberlanjutan kolaborasi adalah faktor krusial. Kolaborasi yang terjalin mencakup seluruh tahap pelaksanaan program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dengan keterlibatan aktif masyarakat lorong, akademisi, sektor swasta, dan pemerintah. Keberlanjutan ini memungkinkan tercapainya tujuan pemulihan ekonomi masyarakat secara jangka panjang melalui penguatan potensi lokal.

Dengan demikian, Program Lorong Wisata mengedepankan kolaborasi yang inklusif, setara, dan berkelanjutan sebagai pendekatan strategis untuk mengintegrasikan potensi lokal ke dalam pengembangan destinasi wisata sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Program Lorong Wisata dirancang dengan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat lorong berperan sebagai aktor utama dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi lokal, seperti kuliner, seni, dan budaya, sebagai daya tarik wisata. Dalam proses ini, pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang mendukung dan mengarahkan langkah-langkah kolaboratif agar tetap

sinergis dan terarah, sehingga setiap inisiatif yang dilakukan mampu mencerminkan kebutuhan dan potensi lokal secara optimal sebagaimana yang dimaksud informan IQD (Lurah Tello Baru) mengatakan bahwa :

“Kami bekerja bersama masyarakat lorong untuk mengidentifikasi potensi lokal, seperti kuliner, seni, dan budaya, yang dapat dijadikan daya tarik wisata. Dalam hal ini, peran pemerintah adalah sebagai fasilitator, sementara masyarakat menjadi aktor utama. Kolaborasi ini memungkinkan setiap langkah yang diambil tetap sinergis dan terarah.”
(hasil wawancara 16 Desember 2024)

Lorong Wisata Kota Makassar, Upaya Pemerintah Perkuat Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Editor : Chaerani



Masyarakat menikmati salah satu lorong wisata yang ada di Kota Makassar. Pengembangan lorong wisata oleh Pemkot Makassar didorong menguatkan kemandirian ekonomi masyarakat. (Dok. Istimewa)

Sumber : <https://republiknews.co.id/lorong-wisata-kota-makassar-upaya-pemerintah-perkuat-kemandirian-ekonomi-masyarakat/>

Gambar 4. 5 Lorong Wisata Kota Makassar, Upaya Pemerintah Perkuat Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Lorong wisata Kota Makassar tidak hanya menjadi program ini juga turut memperkuat identitas budaya lokal yang menjadi daya tarik utama setiap

lorong tetapi juga menjadi destinasi wisata menciptakan berbagai peluang ekonomi, seperti pemasaran produk lokal, penyediaan jasa pemandu wisata, dan pengelolaan homestay. Sejalan dengan pernyataan diatas informan MIAA (Dewan Lorong Wisata Sidney Tello Baru) mengatakan :

“Hasil nyata dari kolaborasi ini adalah meningkatnya penghasilan masyarakat lorong. Dengan membuka akses lorong sebagai destinasi wisata, masyarakat dapat memanfaatkan peluang ekonomi, seperti menjual produk lokal, menawarkan jasa pemandu wisata, atau menjalankan homestay. Pemulihan ekonomi ini berjalan seiring dengan penguatan identitas budaya di lorong” (hasil wawancara 3 Januari 2024 2024)

Hal tersebut sejalan dengan informan MH (Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Sosial) mengatakan bahwa :

“Melalui Program Lorong Wisata, kami tidak hanya ingin meningkatkan ekonomi, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan di antara masyarakat. Kolaborasi yang berkelanjutan ini menjadi pondasi untuk memastikan bahwa setiap lorong di Makassar dapat berkembang tanpa kehilangan identitas lokalnya” (hasil wawancara 17 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara informan IQD, MIAA dan MH Program Lorong Wisata di Kota Makassar merupakan inisiatif strategis yang dirancang dengan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat lorong berperan sebagai aktor utama dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi lokal, seperti kuliner, seni, dan budaya, sebagai daya tarik wisata. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang memastikan sinergi dan arah yang jelas dalam setiap langkah kolaborasi. Program ini tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, seperti pemasaran produk lokal, penyediaan jasa pemandu wisata, dan pengelolaan homestay, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal sebagai

ciri khas lorong. Dampak nyata dari kolaborasi ini adalah meningkatnya penghasilan masyarakat serta terbangunnya rasa kebersamaan yang menjadi fondasi keberlanjutan program. Dengan demikian, Program Lorong Wisata tidak hanya berfokus pada pemulihan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kemandirian ekonomi masyarakat dan pelestarian nilai-nilai lokal.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Program Lorong Wisata di Kota Makassar sejalan dengan definisi pergerakan prinsip bersama dalam kolaborasi, di mana setiap pihak yang terlibat pemerintah, masyarakat lorong, dan pelaku usaha secara kolektif berupaya mewujudkan lorong-lorong sebagai destinasi wisata berbasis kearifan lokal dan penggerak ekonomi masyarakat. Kolaborasi ini berlangsung secara berkelanjutan dengan menekankan keselarasan visi dan komitmen bersama, sehingga setiap langkah yang diambil mulai dari perencanaan hingga evaluasi dapat terarah secara sinergis menuju pencapaian tujuan bersama. Prinsip *Collaborative Governance* yang diterapkan memastikan bahwa proses ini tidak hanya melibatkan masukan dari berbagai pihak, tetapi juga menghasilkan solusi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal, memperkuat identitas budaya, serta menciptakan keberlanjutan dalam pemulihan ekonomi masyarakat.

b. Motivasi Bersama

Motivasi bersama merujuk pada dorongan atau tekad yang dimiliki oleh semua pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan tertentu secara kolektif. Semua pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang seragam, yaitu bekerja bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan ini mencakup berbagai

aspek yang ingin dicapai melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, yang kesemuanya diarahkan pada pengembangan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Program Lorong Wisata di Kota Makassar merupakan salah satu inisiatif yang melibatkan berbagai pihak dalam upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan ekonomi melalui pengembangan wisata berbasis kearifan lokal. Dalam hal ini, motivasi bersama menjadi faktor penting yang mendorong semua pihak untuk bekerja secara kolektif dan menyatukan tekad dalam mencapai hasil yang diinginkan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana motivasi bersama berperan dalam upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi yang efektif dalam program ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan ZIH (Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Makassar), yang mengatakan bahwa :

"Dalam Program Lorong Wisata, motivasi bersama sangat kuat di antara semua pihak yang terlibat. Baik itu pemerintah, komunitas lokal, pelaku usaha, maupun masyarakat, semua memiliki tekad yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan pariwisata berbasis lokal." (hasil wawancara 11 Desember 2024).

Sama halnya dengan pendapat informan SF (Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota Makassar), mengatakan bahwa :

"Semua pihak yang terlibat, baik dari Dinas Pariwisata, dinas terkait lainnya, hingga warga lorong itu sendiri, memiliki motivasi yang sama, yaitu untuk menjadikan lorong-lorong ini sebagai pusat ekonomi yang dapat mendukung sektor pariwisata. Kami bekerja bersama dengan tekad yang sama untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan" (hasil wawancara 18 Desember 2024).

Ditambahkan informan ZS (Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) menjelaskan pandangannya terkait motivasi bersama :

“Motivasi bersama ini tercermin dalam komitmen yang sangat kuat dari semua pihak. Pemerintah berperan sebagai pengarah kebijakan, pelaku usaha mengembangkan produk wisata, dan masyarakat terlibat langsung dalam menciptakan suasana yang nyaman dan menarik bagi wisatawan. Ini adalah bentuk kolaborasi yang sejati, yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi dengan cara yang berbasis pada kearifan lokal.”
(hasil wawancara 17 Desember 2024)

Berdasarkan dari hasil wawancara informan ZS, ZIH dan SF menjelaskan bahwa Program Lorong Wisata di Kota Makassar menunjukkan bahwa Program ini mengusung motivasi bersama sebagai faktor penggerak utama yang menyatukan tujuan seluruh pihak yang terlibat, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan wisata berbasis kearifan lokal. Sebagaimana diungkapkan oleh informan, motivasi bersama tercermin dalam tekad yang kuat dari semua pihak untuk mencapai tujuan yang sama, baik itu pemerintah yang berperan sebagai pengarah kebijakan, pelaku usaha yang mengembangkan produk wisata, maupun masyarakat yang aktif terlibat dalam menciptakan suasana yang mendukung sektor pariwisata. Kolaborasi yang terjalin secara sinergis ini menjadi pondasi utama dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan pelestarian kearifan lokal.

Di Kota Makassar, salah satu upaya penting untuk mencapainya adalah melalui pemberdayaan masyarakat lorong. Motivasi utama dalam mendorong

pemulihan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan produk wisata, pelatihan, dan promosi pariwisata. Menurut informan MIAA (Dewan Lorong Wisata Sydney Kelurahan Tello Baru) menjelaskan :

“Motivasi bersama kami sangat jelas, yakni mendorong pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat lorong. Setiap langkah yang diambil baik itu dalam pengembangan produk wisata, pelatihan untuk masyarakat, maupun promosi pariwisata selalu berfokus pada satu tujuan utama: meningkatkan pendapatan masyarakat dan memberikan manfaat yang luas bagi ekonomi kota Makassar.” (hasil wawancara 7 Januari 2025)

Kemudian ditambahkan oleh informan IQD (Lurah Tello Baru) mengatakan bahwa :

“Kami berharap program ini dapat berjalan terus menerus, dengan motivasi bersama yang selalu mengedepankan keberlanjutan. Tujuan kami adalah agar Lorong Wisata bukan hanya menjadi daya tarik wisata sesaat, tetapi benar-benar menjadi pilar ekonomi yang mendukung masyarakat lokal dalam jangka panjang” (Hasil wawancara 3 Januari 2025)

Menurut informan RA (Masyarakat Lorong Wisata Sydney Tello Baru), mengatakan :

Motivasi kami adalah untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan tradisi yang ada di Lorong Wisata Sydney Tello Baru, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian kami. Kami juga bekerja bersama-sama untuk membuat lorong ini menjadi lebih baik, lebih hidup, dan tentunya lebih mendatangkan manfaat bagi setiap keluarga di sini”
(hasil wawancara 3 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara informan IQD, RA dan MIAA menyimpulkan bahwa Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan produk wisata, pelatihan, dan promosi pariwisata, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memberikan

manfaat jangka panjang bagi ekonomi Kota Makassar. Sebagaimana dijelaskan oleh informan, motivasi bersama yang jelas dari semua pihak terlibat, baik pemerintah maupun masyarakat, adalah untuk menciptakan Lorong Wisata sebagai pilar ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi yang terus-menerus dengan fokus pada keberlanjutan menjadi kunci dalam memastikan bahwa Lorong Wisata bukan hanya sekadar daya tarik wisata, tetapi juga memberi dampak positif yang signifikan bagi perekonomian lokal. Keberhasilan program ini tidak hanya terletak pada pengembangan pariwisata, tetapi juga pada upaya untuk memperkenalkan dan melestarikan kekayaan budaya serta meningkatkan kesejahteraan setiap keluarga di lorong tersebut.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Program Lorong Wisata di Kota Makassar berhasil mendorong pemulihan ekonomi melalui kolaborasi yang didasarkan pada motivasi bersama. Semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha, memiliki tujuan yang seragam untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan mengembangkan wisata berbasis kearifan lokal. Motivasi bersama ini tercermin dalam tekad kolektif untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti pengembangan produk wisata, pelatihan, dan promosi pariwisata. Kolaborasi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan dampak positif yang signifikan bagi ekonomi lokal, serta pelestarian nilai-nilai budaya. Keberhasilan program ini bukan hanya terletak pada aspek pariwisata, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat lorong untuk menciptakan pilar ekonomi yang berkelanjutan.

c. Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

Kapasitas untuk bertindak bersama dalam pengembangan pariwisata merupakan kemampuan yang dimiliki oleh berbagai pihak untuk bekerja sama secara efektif dalam mewujudkan tujuan bersama. Dalam konteks *Collaborative Governance*, kapasitas ini mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memperkuat kolaborasi di antara pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Melalui program Lorong Wisata di Kota Makassar, kolaborasi ini difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi dengan melibatkan kontribusi aktif dari semua pihak sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing. Setiap aktor membawa keahlian, sumber daya, dan tanggung jawab tertentu yang, jika dikelola dengan baik, dapat menghasilkan dampak positif secara kolektif untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut informan SF (Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota Makassar), menjelaskan bahwa :

“Kami dari pihak pemerintah memastikan semua pihak bisa bekerja sama dengan baik. Kami menyediakan pelatihan untuk masyarakat, membantu membangun fasilitas lorong, dan menghubungkan mereka dengan pelaku usaha. Kami ingin semua pihak punya peran aktif untuk memajukan pariwisata” (hasil wawancara 16 Desember 2024).



DWP Kota Makassar Berdayakan Perempuan Lorong Wisata Melalui Pelatihan Merajut/Humas Kominfo Makassar

Sumber : <https://sulses.terkini.id/2023/12/13/dwp-kota-makassar-berdayakan-perempuan-lorong-wisata-melalui-pelatihan-merajut>

Gambar 4. 6 Pemberdayaan perempuan di lorong wisata melalui kegiatan pelatihan merajut.

Hal ini sejalan dengan pendapat informan IQD (Lurah Tello Baru) yang mengatakan bahwa :

“Kami juag kadang mengadakan pelatihan supaya warga lebih paham tentang pengelolaan wisata. Selain itu, kami juga mendampingi mereka agar usaha yang dijalankan bisa berkembang. Dengan begini, masyarakat lebih semangat dan kompak untuk memajukan lorong ini.” (hasil wawnacara 3 Januari 2025).

Pernyataan diatas didukung oleh informan ZS (Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) menjelaskan bahwa :

“Masyarakat di lorong ini semakin kompak setelah mendapat pelatihan. Mereka sekarang tahu bagaimana cara mengelola usaha kecil, seperti menjual makanan khas atau menyediakan jasa pemandu wisata. Setiap orang punya kontribusi sesuai kemampuan mereka, dan itu membuat lorong ini jadi menarik untuk wisatawan.” (Hasil Wawancara 20 Desember 2024).

Berdasarkan hasil wawancara informan, SZ, IQD dan SF Kesimpulan dari Program Lorong Wisata di Kota Makassar menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin melibatkan kontribusi aktif dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator utama dengan menyediakan pelatihan, membangun infrastruktur pendukung, serta menjembatani masyarakat dengan pelaku usaha. Bertujuan untuk memastikan semua pihak memiliki peran aktif dalam memajukan pariwisata berbasis kearifan lokal. Selain itu, pemberdayaan

masyarakat menjadi elemen penting. Pelatihan yang diberikan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mengelola usaha kecil dan jasa wisata, yang berdampak pada penguatan semangat dan kekompakan warga lorong. Hasilnya, setiap individu dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuannya, menciptakan dampak positif yang kolektif. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam membangun pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan mendukung pemulihan ekonomi lokal.

Kolaborasi yang efektif membutuhkan komunikasi yang terbuka dan pemahaman yang mendalam di antara semua pihak yang terlibat. Dalam program Lorong Wisata, menciptakan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan. Untuk memastikan kerjasama ini berjalan lancar, diperlukan pendekatan yang inklusif dan ruang untuk berdialog, sehingga setiap pihak dapat menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan solusinya secara bersama-sama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan MIAA (Dewan Lorong Wisata Sydney Tello Baru) mengatakan bahwa :

“Supaya semua pihak bisa bekerja sama, kami rutin mengadakan pertemuan. Di sana, masyarakat, pemerintah, dan swasta berdiskusi untuk memastikan semua orang merasa didengar. Kalau ada masalah, kami selesaikan bersama” (Hasil wawancara 3 Janurari 2025)

Lorong Wisata Makassar Punya Dewan Lorong

Kompas.tv - 19 Juni 2022, 22:39 WIB

Share:   



Sumber : <https://www.kompas.tv/regional/300681/lorong-wisata-makassar-punya-dewan-lorong>

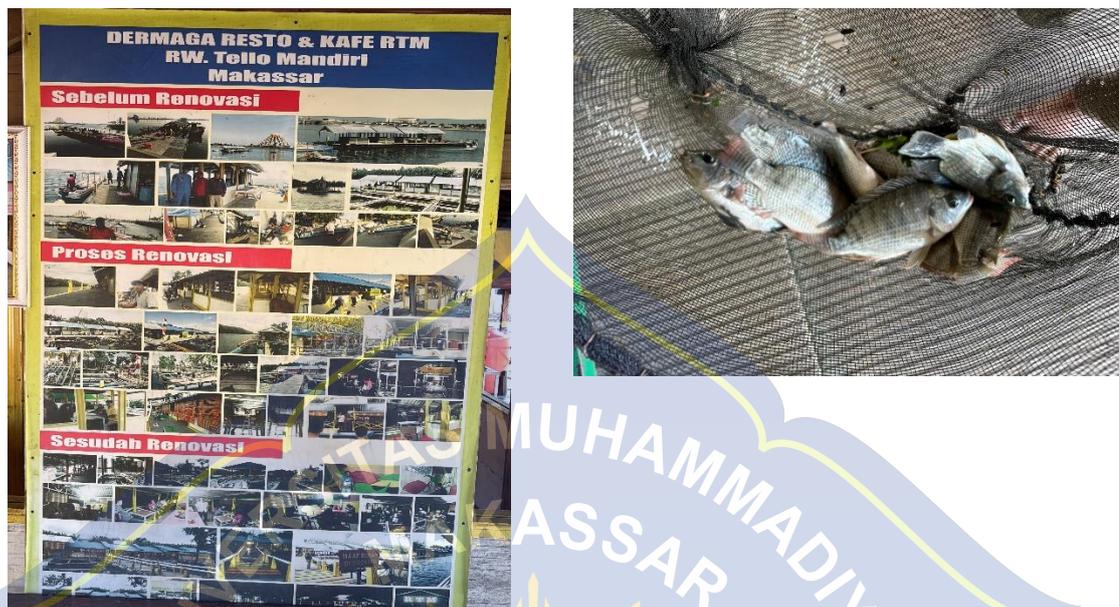
Gambar 4. 7 Pertemuan Rutin dengan Dewan Lorong Wisata

Menurut informan RA (Masyarakat Lorong wisata Sydney Tello Baru)

mengatakan :

“Kami di sini saling membantu dan bekerja sama untuk membuat lorong ini menjadi tempat wisata yang menarik. Setiap orang punya peran masing-masing, ada yang menjual makanan, ada yang menjaga kebersihan, dan ada juga yang membuat kerajinan untuk dijual ke wisatawan. Kami merasa ini adalah peluang besar untuk meningkatkan penghasilan kami” (Hasil wawancara 6 januari 2025).





Gambar 4. 8 Usaha di Lorong Wisata Sydney Tello Baru

Berdasarkan hasil wawancara MIAA dan RA Program Lorong Wisata di Kota Makassar menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif memerlukan komunikasi terbuka dan pendekatan inklusif yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Sinergi ini terwujud melalui pertemuan rutin, di mana semua pihak berdiskusi untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan solusi secara bersama-sama. Pendekatan ini memastikan setiap pihak merasa didengar dan berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, peran masyarakat sangat signifikan dalam menjaga keberlanjutan program ini. Masyarakat aktif berpartisipasi sesuai peran masing-masing, seperti menjual makanan, menjaga kebersihan, dan membuat kerajinan. Partisipasi ini tidak hanya menciptakan daya tarik wisata, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Dengan pendekatan inklusif dan

kolaborasi yang erat, program ini berhasil menciptakan dampak positif yang mendukung pemulihan ekonomi lokal dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan untuk bagian Kapasitas melakukan tindakan bersama dimana Program Lorong Wisata di Kota Makassar menunjukkan keberhasilan melalui kolaborasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dengan menyediakan pelatihan, infrastruktur pendukung, dan menjembatani masyarakat dengan pelaku usaha. Pemberdayaan masyarakat, melalui pelatihan dan pendampingan, meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha kecil dan jasa wisata, yang memperkuat kekompakan warga. Komunikasi terbuka dan pendekatan inklusif menjadi kunci dalam kolaborasi ini, sebagaimana terlihat dari pertemuan rutin yang memungkinkan semua pihak berdiskusi dan mencari solusi bersama. Partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai peran, seperti menjual produk lokal, menjaga kebersihan, dan membuat kerajinan, tidak hanya memperkuat daya tarik wisata, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi ini mencerminkan prinsip *Collaborative Governance*, di mana kapasitas untuk bertindak bersama dibangun melalui sinergi semua pemangku kepentingan, menciptakan pariwisata berbasis kearifan lokal yang inklusif, berkelanjutan, dan mendukung pemulihan ekonomi lokal.

2. Tindakan Kolaborasi

Tindakan kolaborasi dalam praktik pengembangan pariwisata dapat bervariasi, tergantung pada tujuan dan kebutuhan masing-masing pihak yang

terlibat. Dalam konteks program Lorong Wisata di Kota Makassar, khususnya di wilayah Lorong Wisata Sydney Tello Baru, bentuk kolaborasi yang dilakukan meliputi kegiatan sosialisasi dan pelatihan (bimtek) yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat lokal mengenai pentingnya pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan, sementara bimtek dirancang untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas.

Dalam hal ini, kegiatan seperti sosialisasi dan bimtek bukan hanya sebagai sarana untuk membangun kapasitas individu, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat hubungan antar pihak yang berkolaborasi, sehingga memungkinkan terciptanya solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengembangan Lorong Wisata di Sydney Tello Baru.

1. Memfasilitasi

Memfasilitasi dalam konteks kolaborasi merupakan langkah penting untuk memastikan proses kerjasama berjalan dengan lancar dan efektif. Kegiatan fasilitasi bertujuan untuk menyederhanakan dan memperjelas komunikasi, keputusan, serta tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok yang terlibat. Dengan adanya fasilitasi, setiap pihak dapat memahami peran dan kontribusinya secara jelas, mengurangi potensi kebingungannya, serta mempercepat pencapaian tujuan bersama.

Dalam upaya pemulihan ekonomi melalui program Lorong Wisata di Kota Makassar, memfasilitasi proses kolaborasi antara masyarakat, pemerintah,

dan sektor swasta menjadi sangat penting. Fasilitator dapat membantu menciptakan ruang untuk diskusi terbuka, menyusun agenda yang jelas, serta memastikan semua pihak berpartisipasi secara aktif. Dengan cara ini, hambatan dalam komunikasi atau pengambilan keputusan dapat diminimalisir, sehingga kolaborasi dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan bersama dalam mengembangkan potensi pariwisata lokal. Sebagaimana yang dikatakan oleh informan ZS (Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), yaitu :

“Fasilitasi yang kami lakukan sangat penting dalam memastikan setiap pihak yang terlibat dalam program Lorong Wisata ini dapat bekerja sama dengan baik. Kami memastikan komunikasi yang lancar, agar masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta semua bisa memahami peran mereka dan berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya” (Hasil wawancara 19 Desember 2024)

Hal ini juga di dukung oleh pernyataan informan RS (Kabid Ketersediaan Dan Produksi Pangan Dinas mengatakan bahwa :

“Kami mendukung Lorong Wisata dengan menyediakan bibit, pelatihan, dan pendampingan bagi warga untuk bercocok tanam di lahan terbatas. Kami juga menghubungkan hasil panen mereka dengan pasar dan pelaku usaha, sehingga bisa meningkatkan ketahanan pangan sekaligus perekonomian warga” (Hasil wawancara 3 Januari 2025).

Sejalan dengan itu menurut informan SF (Kabid Pengembangan Destrinasi Pariwisata Kota Makassar), mengatakan bahwa :

“Kami membantu menyusun peran dan kontribusi setiap pihak, agar tidak ada kebingungan dalam pengembangan lorong wisata” (Hasil Wawancara 18 Desember 2024).

Camat Manggala Siap Bantu Longwis yang Butuh Bantuan



Sumber : <https://diswaysulsel.com/camat-manggala-siap-bantu-longwis-yang-butuh-bantuan/>

Gambar 4. 9 Pemerintah Fasilitasi Lorong Wisata

Kemudian ditambahkan oleh informan ZIH (Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Makassar), mengatakan :

“Kami berperan sebagai penghubung untuk menyederhanakan komunikasi antara semua pihak yang terlibat. Dengan fasilitasi yang tepat, semua orang tahu apa yang perlu mereka lakukan, peran mereka dalam pengembangan lorong wisata, dan bagaimana cara kami bisa mendukung mereka. Ini membantu agar tujuan bersama tercapai lebih cepat.” (Hasil Wawancara 23 Desember 2024).

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan informan SF, ZS dan ZIH menunjukkan bahwa fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah sangat penting dalam memastikan kelancaran kolaborasi antara semua pihak yang terlibat dalam program Lorong Wisata. Fasilitasi ini mencakup penyusunan peran dan kontribusi setiap pihak agar tidak ada kebingungan dalam pengembangan program, serta memastikan komunikasi yang lancar antara pemerintah,

masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah berperan sebagai penghubung yang menyederhanakan komunikasi, sehingga setiap pihak mengetahui perannya dan bagaimana mereka dapat berkontribusi sesuai kapasitasnya. Dengan pendekatan fasilitasi yang tepat, program Lorong Wisata dapat berjalan lebih efektif dan tujuan bersama dapat tercapai lebih cepat, yaitu menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memastikan kelancaran implementasi program Lorong Wisata, penting untuk memperhatikan peran serta setiap elemen masyarakat dalam tingkat kelurahan. Dalam hal ini, kerjasama yang solid antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan agar tujuan bersama dapat tercapai. Oleh karena itu, fasilitasi yang tepat menjadi kunci dalam menjaga keberhasilan kolaborasi ini, khususnya dalam memastikan bahwa semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif. Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan IQD (Lurah Tello Baru) yaitu :

“Di tingkat kelurahan, kami memastikan proses kolaborasi ini berjalan dengan baik dengan memberikan dukungan dan memfasilitasi setiap pertemuan antara masyarakat dan pemerintah. Kami membantu masyarakat untuk memahami proses, baik itu dari segi administratif maupun dalam pengelolaan lorong wisata.” (Hasil wawancara 3 Januari 2025)

Hal ini sejalan dengan informan NA (kapid jalan dan jembatan Dinas PUPR) yang mengatakan bahwa :

“Kami berperan dalam membangun, memperbaiki, dan merawat jalan serta jembatan agar infrastruktur tetap layak dan aman digunakan. Selain itu, kami juga memfasilitasi koordinasi antara pemerintah, kontraktor, dan masyarakat untuk memastikan setiap proyek berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai standar.” (Hasil wawancara 11 Januari 2025)

Ditambahkan oleh informan MR (Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Sosial) mengatakan bahwa :

“kalau ada masalah atau kebingungan, kami menjadi penghubung agar informasi bisa disampaikan dengan jelas. Fasilitasi di tingkat kelurahan memudahkan koordinasi antara masyarakat dan pemerintah, serta membantu menghindari miskomunikasi.” (Hasil wawancara 8 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara informan IQD dan MR menunjukkan bahwa untuk memastikan kelancaran implementasi program Lorong Wisata, peran serta setiap elemen masyarakat di tingkat kelurahan sangat penting. Kerjasama yang solid antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan bersama. Fasilitasi yang tepat di tingkat kelurahan memainkan peran vital dalam menjaga keberhasilan kolaborasi ini. Melalui fasilitasi yang baik, setiap pihak dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif, menghindari miskomunikasi, serta memastikan pemahaman yang jelas mengenai proses administratif dan pengelolaan program. Dengan dukungan yang tepat, koordinasi antara masyarakat dan pemerintah dapat berjalan dengan baik, yang pada akhirnya mendukung pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya kolaboratif dalam pengembangan Lorong Wisata, peran penghubung antara masyarakat dan pemerintah sangat penting. Dalam hal ini, pihak yang terlibat perlu memiliki saluran komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa semua permasalahan atau kebutuhan dapat disampaikan dengan jelas. Untuk itu, fasilitasi menjadi langkah strategis yang membantu menciptakan komunikasi yang lebih baik antara kedua belah pihak.

Sejalan dengan penjelasan informan MIAA (Dewan Lorong Wisata Sydney Tello Baru), mengatakan bahwa :

“.....sebagai dewan lorong wisata, saya memiliki peran sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Saya aktif memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak, agar semua bisa menyampaikan kebutuhan atau masalah yang ada.” (Hasil wawancara 6 Januari 2025)

Selanjutnya menurut informan RA (masyarakat Lorong Wisata Sydney tello Baru) mengatakan :

“Fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah dan dewan lorong sangat membantu kami dalam memahami bagaimana cara yang tepat untuk mengelola usaha kecil kami. Kami dilibatkan dalam berbagai kegiatan dan mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kami. Ini membuat kami lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha yang menarik bagi wisatawan “ (Hasil wawncara 7 januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara informan MIAA dan RA dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan Lorong Wisata, peran penghubung antara masyarakat dan pemerintah sangat krusial untuk kelancaran program. Saluran komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan agar semua masalah dan kebutuhan dapat disampaikan dengan jelas. Fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan dewan lorong wisata memiliki peran strategis dalam menciptakan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Melalui fasilitasi ini, masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan usaha kecil, serta pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan diri dalam mengembangkan usaha yang menarik bagi wisatawan. Kolaborasi yang terjalin melalui fasilitasi ini memperkuat partisipasi aktif dan memastikan keberhasilan program Lorong Wisata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa fasilitasi merupakan elemen fundamental dalam memastikan efektivitas kolaborasi dalam program Lorong Wisata. Fasilitasi ini mencakup penyusunan peran dan kontribusi setiap pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk mengurangi kebingungan dan meningkatkan pemahaman terhadap proses administratif dan pengelolaan program. Peran pemerintah sebagai penghubung antar pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan sektor swasta adalah kunci dalam menciptakan komunikasi yang jelas dan lancar. Fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan dewan lorong wisata bertujuan untuk menyederhanakan proses koordinasi dan memastikan setiap pihak dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif. Selain itu, pendekatan fasilitasi yang tepat akan mempercepat pencapaian tujuan bersama, yaitu pengembangan pariwisata yang berkelanjutan berbasis kearifan lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi yang terjalin melalui fasilitasi ini tidak hanya meningkatkan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat, tetapi juga memperkuat pencapaian hasil yang lebih optimal dalam implementasi program Lorong Wisata.

2. Memajukan Proses Kolaborasi

Dalam upaya memajukan proses kolaborasi dengan merangkul seluruh pihak yang berperan dalam *Collaborative Governance* sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Melalui Program Lorong Wisata Di Kota Makassar dan bisa menjaga kerjasama yang telah dijalin agar keadaan yang lebih baik dan membangun proses kolaborasi dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Melalui

Program Lorong Wisata Di Kota Makassar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan ZS (Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) mengatakan bahwa :

“Untuk menjaga kerjasama yang telah terjalin, kami secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan diskusi evaluasi. Ini membantu kami memastikan semua pihak tetap berada pada jalur yang sama” (Hasil wawancara 19 Desember 2024).

Selanjutnya informan ZIH (Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Makassar) menjelaskan :

” Kami juga fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan yang mendukung sektor pariwisata. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam program ini” (Hasil wawancara 27 Desember 2024).

Berdasarkan dari hasil wawancara informan ZIH dan ZS menjelaskan bahwa keberlanjutan kerjasama dalam program Lorong Wisata dijaga melalui koordinasi dan evaluasi berkala. Rapat koordinasi dan diskusi evaluasi menjadi langkah strategis untuk memastikan semua pihak yang terlibat tetap berada pada jalur yang sama dalam mencapai tujuan program. Selain itu, upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan yang relevan dengan sektor pariwisata juga menjadi fokus utama. Pendekatan ini tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai penerima manfaat, tetapi juga mendorong mereka untuk berperan aktif sebagai pelaku utama dalam pengembangan program. Strategi ini memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, serta mendukung terciptanya pariwisata berbasis pemberdayaan lokal yang berkelanjutan.

Pendekatan langsung dan keterlibatan aktif dengan masyarakat menjadi salah satu strategi penting dalam membangun hubungan yang kuat dan memahami kebutuhan mereka secara mendalam. Dengan mendengarkan langsung aspirasi warga, setiap langkah yang diambil dapat lebih relevan dan sesuai dengan kondisi lapangan. Menurut informan SF (Kabid Pengembangan Destrinasi Pariwisata Kota Makassar) mengatakan bahwa :

“Kadang saya sendiri turun langsung ke lapangan untuk berbicara dengan warga dan mendengarkan saran mereka. Dengan seperti ini kami bisa lebih memahami apa yang sebenarnya mereka butuhkan” (Hasil wawancara 17 Desember 2024).

Sejalan dengan ini informan IQD (Lurah Tello Baru) mengatakan bahwa:

“ Saya sering berkeliling lorong untuk bertemu langsung dengan warga. Kadang, obrolan santai di pos ronda atau warung kopi justru lebih efektif untuk mengetahui kebutuhan mereka” (Hasil wawancara 7 januari 2025)

Kemudian ditambahkan oleh informan MA (Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Sosial) yang mengatakan bahwa :

“Kolaborasi ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga komunitas lokal dan UMKM. Kami memfasilitasi pertemuan untuk menyelaraskan visi dan strategi, sehingga semua pihak memiliki arah yang sama dalam membangun lorong wisata” (Hasil wawancara 8 januari 2025)

Kesimpulan dari wawancara informan MA, IQD dan SF menunjukkan bahwa pendekatan langsung dan komunikasi informal dengan masyarakat sangat penting untuk memahami kebutuhan mereka. Keterlibatan aktif pemerintah, seperti turun langsung ke lapangan dan berbincang santai di pos ronda atau warung kopi, menambah pemahaman yang lebih mendalam terhadap

kondisi dan harapan masyarakat. Selain itu, kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, komunitas lokal, dan UMKM, juga sangat diperlukan. Fasilitasi pertemuan untuk menyelaraskan visi dan strategi antara semua pihak menjadi kunci agar program dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan bersama dalam pengembangan Lorong Wisata.

Peran penghubung antara masyarakat dan pemerintah sangat krusial untuk memastikan setiap aspirasi dan kebutuhan warga dapat tersampaikan dengan baik. Sebagai perwakilan lorong wisata, kami berupaya untuk menciptakan saluran komunikasi yang efektif agar semua suara warga didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan MIAA (Dewan Lorong Wisaya Synedy Tello Baru) yang menagatakan bahwa :

“Sebagai perwakilan lorong wisata, saya tentunya memastikan semua masukan warga disampaikan kepada pemerintah. Saya juga berusaha menjadi jembatan agar tidak ada aspirasi yang terabaikan..... selain itu saya bertugas mendampingi warga dalam menyampaikan ide mereka secara langsung kepada pihak dinas.” (Hasil wawancara 7 Januari 2025).

Hal ini di dukung oleh informan RA (Masyarakat Lorong wisata Sydney Tello Baru), yang menjelaskan :

“Kami disini dek merasa didukung karena pemerintah, pak lurah dan dewan lorong sering turun langsung untuk mendengar aspirasi kami. Ini membuat kami semakin semangat menjaga dan mengembangkan lorong wisata bersama-sama. Selain itu, kami menjaga kebersamaan di antara warga. Misalnya, dengan membagi tanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan keamanan lorong wisata, sehingga pengunjung merasa nyaman” (Hasil wanaacra 3 Januari 2025).

Berdasarkan hasil kesimpulan dari informan RA dan MIAA menunjukkan bahwa peran penghubung yang dijalankan oleh perwakilan lorong

wisata sangat penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Dengan menjadi jembatan komunikasi, deawa lorong memastikan bahwa masukan dari warga tidak terabaikan. Keterlibatan langsung dari pemerintah, seperti yang dilakukan oleh lurah dan dewan lorong, juga meningkatkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan lorong wisata. Selain itu, kolaborasi antarwarga dalam menjaga kebersihan dan keamanan lorong wisata turut memperkuat keberlanjutan program, sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pengunjung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi program Lorong Wisata di Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh koordinasi yang efektif, komunikasi yang transparan, serta kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pendekatan langsung pemerintah, melalui interaksi informal dengan masyarakat, telah memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebutuhan lokal dan mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan program. Kolaborasi ini turut memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata, mendukung keberlanjutan program, serta berperan dalam upaya pemulihan ekonomi daerah. Fasilitasi komunikasi yang berkelanjutan dan pertemuan evaluasi secara berkala menjadi faktor kunci dalam menyelaraskan visi dan strategi antar pihak yang terlibat, memastikan tercapainya tujuan bersama dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan.

3. Dampak serta Adaptasi dalam Proses Kolaborasi

Dampak serta adaptasi proses kolaborasi merupakan dampak yang ditimbulkan dari proses kolaborasi. Dampak tersebut dapat menghasilkan umpan balik yang kemudian di adaptasi dalam proses kolaborasi dalam Upaya Pemulihan Ekonomi melalui Program Lorong Wisata di Kota Makassar.

Dampak dari kolaborasi yang efektif menghasilkan umpan balik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses kolaborasi. Umpan balik ini memungkinkan penyesuaian strategi yang lebih tepat, mengoptimalkan program Lorong Wisata di Kota Makassar, serta memastikan komunikasi yang lebih baik dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

1. Dampak dan Umpak Balik

Dampak merujuk pada hasil atau perubahan yang terjadi akibat suatu tindakan atau program, baik positif maupun negatif. Umpan balik adalah informasi yang diberikan sebagai respons terhadap tindakan tersebut, yang berfungsi untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses yang ada. Dalam program Lorong Wisata di Kota Makassar, dampak dapat berupa peningkatan ekonomi masyarakat, sementara umpan balik digunakan untuk menyesuaikan dan meningkatkan efektivitas kolaborasi.

Keberhasilan Program Lorong Wisata dapat dilihat dari dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Program ini tidak hanya memperkenalkan potensi wisata lokal, tetapi juga secara langsung mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar. Sebagaimana yang

dijelaskan oleh informan ZS (Kabid Pengemngangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) mengatakan bahwa :

“Program Lorong Wisata sudah memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi masyarakat sekitar. Kami melihat peningkatan kunjungan wisatawan, yang berdampak pada meningkatnya pendapatan pelaku usaha lokal seperti pedagang dan pengusaha kuliner.” (Hasil wawancara 23 Desember 2024)

Hal tersebut di dukung oleh pernyataan infroman IQD (Lurah Tello Baru) yang mengatakan :

“Dampak positif yang kami rasakan adalah peningkatan kesejahteraan warga, terutama yang terlibat langsung dalam usaha kecil dan menengah di lorong wisata. Mereka kini memiliki penghasilan tambahan yang lebih stabil” (Hasil wawancara 7 Januari 2025).

Sejalan dengan itu informan RA (Masyarakat Lorong Wisata Sydney Tello Baru) mengatakan bahwa :

“ Kami merasakan dampak positif dari adanya lorong wisata ini, terutama dalam hal ekonomi. Banyak warga yang membuka usaha baru, dan pendapatan kami meningkat. “ (Hasil wawancara 6 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara informan ZS, IQD dan RA menunjukkan bahwa Keberhasilan Program Lorong Wisata di Kota Makassar tercermin dari dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, terutama dalam peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Program ini tidak hanya memperkenalkan potensi wisata lokal, tetapi juga memberikan peluang baru bagi pengusaha kecil dan menengah. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan berkontribusi pada peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal, seperti pedagang dan pengusaha kuliner. Hal ini sejalan dengan peningkatan kesejahteraan warga yang terlibat langsung dalam usaha kecil di lorong wisata. Selain itu, banyaknya usaha baru yang dibuka oleh warga juga memperkuat dampak ekonomi yang dirasakan.

Dengan demikian, program ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemulihan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terlibat langsung.

Meskipun program ini memberikan dampak positif, kami menerima umpan balik dari masyarakat tentang beberapa fasilitas yang perlu perbaikan, seperti kenyamanan lorong yang masih kurang untuk pengunjung. Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan SF (Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota Makassar) yang mengatakan bahwa :

“.....kami juga menerima umpan balik dari masyarakat yang menunjukkan bahwa masih ada beberapa fasilitas yang perlu diperbaiki. Misalnya, beberapa lorong masih kurang nyaman untuk dilalui pengunjung, jadi kami berusaha untuk segera melakukan perbaikan” (Hasil wawancara 28 Desember 2024).

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari informan MIAA (Dewan Lorong Wisata Sydney Tello Baru), menjelaskan :

“Saya juga pernah mendengar umpan balik dari warga yang menginginkan lebih banyak pelatihan mengenai cara mengelola bisnis di lorong wisata. Selain itu beberapa masukan terkait pengelolaan kebersihan dan keamanan yang perlu diperhatikan lebih serius” (Hasil wawancara 6 Januari 2025).

Kemudian ditambahkan oleh informan RA (Masyarakat Lorong Wisata Sydney Tello Baru) yang mengatakan :

“.....ada juga beberapa masukan terkait fasilitas umum seperti penerangan dan tempat duduk yang masih perlu diperbaiki. Kami berharap masalah ini bisa segera diselesaikan agar pengunjung merasa lebih nyaman” (Hasil wawancara 8 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara informan RA, MIAA dan SF menjelaskan bahwa meskipun Program Lorong Wisata memberikan dampak positif, terdapat beberapa umpan balik dari masyarakat yang menunjukkan adanya kebutuhan

untuk perbaikan fasilitas. Beberapa lorong masih kurang nyaman untuk dilalui pengunjung, sehingga perbaikan segera menjadi prioritas. Selain itu, perlunya lebih banyak pelatihan mengenai pengelolaan bisnis di lorong wisata serta perhatian lebih terhadap kebersihan dan keamanan serta fasilitas umum seperti penerangan dan tempat duduk juga perlu diperbaiki agar pengunjung merasa lebih nyaman. Dengan memperhatikan umpan balik ini, diharapkan program Lorong Wisata dapat terus berkembang dan meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat dan pengunjung.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa Keberhasilan Program Lorong Wisata di Kota Makassar tercermin dari dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Program ini tidak hanya memperkenalkan potensi wisata lokal, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan berkontribusi pada peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal, seperti pedagang dan pengusaha kuliner, serta meningkatkan kesejahteraan warga yang terlibat langsung dalam usaha kecil di lorong wisata. Selain itu, banyaknya usaha baru yang dibuka oleh warga semakin memperkuat dampak ekonomi yang dirasakan. Program ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemulihan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang terlibat langsung. Namun, meskipun memberikan dampak positif, terdapat umpan balik dari masyarakat yang menunjukkan perlunya perbaikan fasilitas. Beberapa lorong masih kurang nyaman untuk dilalui pengunjung, sehingga perbaikan segera menjadi prioritas.

Selain itu, terdapat permintaan untuk lebih banyak pelatihan dalam pengelolaan bisnis di lorong wisata, serta perhatian lebih terhadap kebersihan, keamanan, dan fasilitas umum seperti penerangan dan tempat duduk. Dengan memperhatikan umpan balik ini, diharapkan program ini dapat terus berkembang dan memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi masyarakat dan pengunjung. Dampak yang dihasilkan menunjukkan perubahan positif pada ekonomi masyarakat, sementara umpan balik dari masyarakat menjadi dasar untuk evaluasi dan perbaikan, guna meningkatkan efektivitas kolaborasi dan keberlanjutan program Lorong Wisata.

D. Pembahasan Penelitian

1. Pembahasan Dinamika Kolaborasi

Menurut Emerson & Tina (2012) Dinamika Kolaborasi adalah bagian yang paling penting. Pengungkapan seberapa baik pelaksanaan kolaborasi terdapat pada dinamika, yang terdapat pergerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan tindakan bersama.

Collaborative Governance dalam Upaya Pemulihan Ekonomi melalui Program Lorong Wisata Di Kota Makassar pada bagian Dinamika Kolaborasi berdasarkan hasil penelitian dilihat dari, Pergerakan Prinsip Bersama, Motivasi Bersama dan Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama. Berikut ini ada penjabaran dari hasil penelitian, yaitu :

a. Pergerakan Prinsip Bersama

Pergerakan prinsip bersama dalam kolaborasi adalah elemen berkelanjutan yang melibatkan upaya kolektif untuk mencapai tujuan

bersama. Keselarasan visi dan komitmen diperlukan agar setiap langkah sinergis mengarah pada pencapaian tujuan yang disepakati.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Program Lorong Wisata di Kota Makassar mencerminkan prinsip pergerakan bersama dalam kolaborasi, di mana pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha secara kolektif mewujudkan lorong sebagai destinasi wisata berbasis kearifan lokal sekaligus penggerak ekonomi. Kolaborasi ini berkelanjutan, menekankan keselarasan visi dan komitmen bersama untuk memastikan langkah-langkah dari perencanaan hingga evaluasi berjalan sinergis. Penerapan prinsip Collaborative Governance memastikan partisipasi berbagai pihak, menghasilkan solusi yang relevan, memperkuat identitas budaya, dan mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi masyarakat.

Prinsip pergerakan bersama dalam kolaborasi menekankan pentingnya keselarasan visi dan komitmen sebagai dasar upaya kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini tercermin dalam Program Lorong Wisata di Kota Makassar, di mana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha berhasil menjadikan lorong sebagai destinasi wisata berbasis kearifan lokal sekaligus penggerak ekonomi. Program ini menunjukkan penerapan prinsip Collaborative Governance yang memastikan partisipasi semua pihak, menghasilkan solusi yang relevan, memperkuat identitas budaya, dan mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi tersebut menjadi kunci keberhasilan kolaborasi yang berfokus pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

b. Motivasi Bersama

Motivasi bersama adalah tekad kolektif yang dimiliki oleh semua pihak untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Kolaborasi ini mencakup sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, dengan tujuan menciptakan pengembangan berkelanjutan yang saling menguntungkan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Program Lorong Wisata di Kota Makassar berhasil mendorong pemulihan ekonomi lokal melalui kolaborasi berbasis motivasi bersama. Pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha memiliki tujuan kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan mengembangkan destinasi wisata yang berakar pada kearifan lokal. Motivasi bersama ini tercermin melalui upaya kolaboratif dalam pengembangan produk wisata, pelaksanaan pelatihan, serta promosi pariwisata. Kolaborasi yang berlangsung secara berkelanjutan menjadi faktor utama dalam menciptakan dampak ekonomi yang signifikan sekaligus melestarikan nilai budaya lokal. Keberhasilan program ini tidak hanya terletak pada peningkatan sektor pariwisata, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat lorong untuk membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan.

Motivasi bersama menjadi inti dari keberhasilan kolaborasi, di mana tekad kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha diarahkan untuk mencapai tujuan pengembangan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Hal ini terbukti dari Program Lorong Wisata di Kota Makassar, yang berhasil memanfaatkan kolaborasi berbasis motivasi bersama

untuk mendorong pemulihan ekonomi lokal. Dengan tujuan kolektif meningkatkan kesejahteraan ekonomi, program ini mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengembangan destinasi wisata melalui pelatihan, promosi, dan pengembangan produk wisata. Keberlanjutan kolaborasi ini tidak hanya memberikan dampak signifikan bagi sektor pariwisata, tetapi juga memberdayakan masyarakat lorong untuk membangun fondasi ekonomi yang kokoh sekaligus melestarikan nilai budaya lokal.

c. Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

Kapasitas bertindak bersama dalam pengembangan pariwisata adalah kemampuan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk bekerja sama secara efektif mencapai tujuan bersama. Dalam Collaborative Governance, kapasitas ini mencakup upaya memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui berbagai kegiatan strategis.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Program Lorong Wisata di Kota Makassar mencerminkan kapasitas tindakan bersama melalui kolaborasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan pelatihan, infrastruktur pendukung, dan menjembatani hubungan antara masyarakat dan pelaku usaha. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan telah meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha kecil dan jasa wisata, sekaligus memperkuat solidaritas warga. Komunikasi terbuka dan pendekatan inklusif menjadi elemen penting, ditunjukkan melalui pertemuan rutin yang memungkinkan diskusi dan solusi bersama. Partisipasi

aktif masyarakat, seperti menjual produk lokal, menjaga kebersihan, dan menghasilkan kerajinan, tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan. Kolaborasi ini mengimplementasikan prinsip-prinsip Collaborative Governance, di mana kapasitas bertindak bersama dibangun melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, mewujudkan pariwisata berbasis kearifan lokal yang inklusif, berkelanjutan, dan mendukung pemulihan ekonomi lokal.

Kapasitas bertindak bersama dalam pengembangan pariwisata mencakup kemampuan berbagai pihak untuk bekerja sama secara efektif guna mencapai tujuan bersama, yang dalam konteks Collaborative Governance melibatkan penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta melalui berbagai kegiatan strategis. Program Lorong Wisata di Kota Makassar menjadi contoh nyata penerapan kapasitas tindakan bersama, di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan memberikan pelatihan, menyediakan infrastruktur, dan menjembatani hubungan antara masyarakat dan pelaku usaha. Melalui pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan dan pendampingan, kemampuan dalam mengelola usaha kecil dan jasa wisata meningkat, sekaligus mempererat solidaritas warga. Pertemuan rutin yang melibatkan komunikasi terbuka dan pendekatan inklusif memungkinkan pemecahan masalah secara bersama-sama, sementara partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek kegiatan wisata menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Collaborative Governance, kolaborasi ini membangun kapasitas bertindak

bersama yang mendukung pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, berkelanjutan, dan mendukung pemulihan ekonomi lokal.

Program Lorong Wisata di Kota Makassar mencerminkan penerapan dinamika kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, dengan menekankan penggerakan prinsip bersama, motivasi kolektif, dan kapasitas bertindak bersama. Kolaborasi yang berkelanjutan ini tidak hanya berfokus pada pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, tetapi juga memperkuat perekonomian lokal melalui pemberdayaan masyarakat, pelatihan, serta menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Emerson & Tina (2012) yang menyatakan bahwa dinamika kolaborasi, yang meliputi penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan tindakan bersama, adalah bagian yang paling penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kolaborasi. Dengan kolaborasi yang sinergis dan komprehensif ini, setiap pemangku kepentingan dapat berperan secara maksimal, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi lokal dan pelestarian budaya, sesuai dengan prinsip-prinsip *Collaborative Governance*.

2. Pembahasan Tindakan Kolaborasi

Menurut Emerson & Tina (2012). Tindakan kolaborasi pada praktiknya sangat beragam, dan merupakan cerminan daripada dinamika kolaborasi. Apapun tindakan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan/event atau diskusi dan sebagainya, dan baik buruknya dapat dilihat dari pembangunan dan pemahaman benar akan dinamika kolaborasi oleh para aktor dan individu kolaborasi.

Collaborative Governance dalam Upaya Pemulihan Ekonomi melalui Program Lorong Wisata Di Kota Makassar pada bagian tindakan kolaborasi berdasarkan hasil penelitian dilihat dari, Memfasilitasi dan Memajukan Proses Kolaborasi. Berikut ini ada penjabaran dari hasil penelitian, yaitu :

a. Memfasilitasi

Fasilitasi dalam kolaborasi penting untuk memastikan kelancaran dan efektivitas kerjasama, dengan menyederhanakan komunikasi, keputusan, dan tindakan yang diambil. Melalui fasilitasi, setiap pihak dapat memahami peran dan kontribusinya secara jelas, mengurangi kebingungannya, serta mempercepat pencapaian tujuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa fasilitasi memainkan peran fundamental dalam memastikan efektivitas kolaborasi dalam Program Lorong Wisata. Fasilitasi ini mencakup pengaturan peran dan kontribusi masing-masing pihak yang terlibat, dengan tujuan mengurangi kebingungannya dan meningkatkan pemahaman terkait proses administratif serta pengelolaan Lorong Wisata. Pemerintah sebagai penghubung antara pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta. Pemerintah dan Dewan Lorong Wisata memfasilitasi proses koordinasi, sehingga setiap pihak dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif. Dengan pendekatan fasilitasi yang tepat, pencapaian tujuan bersamayaitu pengembangan

pariwisata berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dipercepat.

Fasilitasi dalam kolaborasi berperan penting untuk memastikan kelancaran dan efektivitas kerjasama dengan menyederhanakan komunikasi, keputusan, dan tindakan yang diambil. Melalui fasilitasi, setiap pihak dapat memahami peran dan kontribusinya dengan jelas, mengurangi kebingungan, serta mempercepat pencapaian tujuan bersama. Dalam konteks Program Lorong Wisata, fasilitasi memainkan peran fundamental dengan mengatur peran dan kontribusi masing-masing pihak yang terlibat, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah dan Dewan Lorong Wisata berperan sebagai penghubung yang memfasilitasi proses koordinasi, sehingga setiap pihak dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif. Dengan pendekatan fasilitasi yang tepat, tujuan bersama, yaitu pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat tercapai lebih cepat dan efektif.

b. Memajukan Proses Kolaborasi

Untuk memajukan proses kolaborasi dalam Collaborative Governance sebagai upaya pemulihan ekonomi melalui Program Lorong Wisata di Kota Makassar, penting untuk melibatkan seluruh pihak yang berperan serta menjaga keberlanjutan kerjasama yang telah terjalin, guna menciptakan kondisi yang lebih baik dan memperkuat proses kolaboratif dalam pemulihan ekonomi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Program Lorong Wisata di Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh koordinasi yang efektif, komunikasi transparan, serta kolaborasi sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pendekatan langsung pemerintah, melalui interaksi informal dengan masyarakat, telah memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebutuhan lokal dan mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan program. Kolaborasi ini memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata, mendukung keberlanjutan program, dan berperan penting dalam pemulihan ekonomi daerah. Fasilitasi komunikasi yang berkelanjutan dan pertemuan evaluasi secara berkala menjadi faktor kunci dalam menyelaraskan visi dan strategi antar pihak yang terlibat, memastikan tercapainya tujuan bersama dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi Program Lorong Wisata sangat dipengaruhi oleh koordinasi yang efektif, komunikasi transparan, dan kolaborasi sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pendekatan langsung yang dilakukan pemerintah, melalui interaksi informal dengan masyarakat, memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebutuhan lokal dan mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan program. Kolaborasi ini juga memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata, mendukung keberlanjutan program, serta berperan penting dalam pemulihan ekonomi daerah. Fasilitasi komunikasi yang berkelanjutan,

ditambah dengan pertemuan evaluasi secara berkala, memastikan tercapainya tujuan bersama dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan.

Tindakan kolaborasi dalam Program Lorong Wisata di Kota Makassar sangat bergantung pada fasilitasi yang efektif, yang memainkan peran kunci dalam menyusun peran dan kontribusi masing-masing pihak. Pemerintah, bersama dengan Dewan Lorong Wisata, mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta, untuk memastikan komunikasi yang jelas, transparan, dan peran yang aktif dalam pengelolaan program. Fasilitasi yang dilakukan mempercepat pencapaian tujuan bersama, seperti pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Koordinasi yang efektif dan pertemuan evaluasi berkala juga memastikan penyelarasan visi antar pihak yang terlibat, memperkuat kolaborasi berkelanjutan, dan mendukung pemulihan ekonomi daerah.

Pendapat ini sejalan dengan pemikiran Emerson & Tina (2012) yang menyatakan bahwa tindakan kolaborasi, baik dalam bentuk kegiatan atau diskusi, mencerminkan dinamika kolaborasi yang terjadi dan keberhasilannya dapat dinilai melalui pemahaman para aktor terhadap proses kolaborasi tersebut. Kolaborasi yang dijalankan secara sinergis dan terfasilitasi dengan baik menjadi kunci utama dalam mewujudkan hasil yang diinginkan.

3. Pembahasan Dampak Dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi

Menurut Emerson & Tina (2012) Dampak dari proses kolaborasi yang efektif menghasilkan umpan balik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan

meningkatkan implementasi Program Lorong Wisata di Kota Makassar. Umpan balik ini memungkinkan penyesuaian strategi yang lebih tepat, mengoptimalkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta memastikan komunikasi yang lebih baik dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Collaborative Governance dalam Upaya Pemulihan Ekonomi melalui Program Lorong Wisata Di Kota Makassar pada Dampak Dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi berdasarkan hasil penelitian dilihat dari dampak dan umpan balik. . Berikut ini ada penjabaran dari hasil penelitian, yaitu :

a. Dampak dan Umpak Balik

Dampak dari proses kolaborasi menghasilkan umpan balik yang kemudian diadaptasi untuk memperbaiki dan mengoptimalkan upaya pemulihan ekonomi melalui Program Lorong Wisata di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Program Lorong Wisata di Kota Makassar tercermin dari dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Program ini tidak hanya mempromosikan potensi wisata berbasis kearifan lokal, tetapi juga membuka peluang baru bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi di lorong wisata. Meskipun demikian, umpan balik dari masyarakat menunjukkan adanya kebutuhan untuk

perbaikan fasilitas, terutama terkait kenyamanan lorong yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, permintaan akan pelatihan pengelolaan bisnis, serta perhatian terhadap kebersihan, keamanan, dan fasilitas umum juga menjadi bagian penting untuk memperbaiki kualitas pengalaman wisata. Dengan memperhatikan umpan balik tersebut, program ini diharapkan dapat terus berkembang, memberikan kenyamanan lebih bagi masyarakat dan pengunjung, serta mendukung pemulihan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari proses kolaborasi dalam Program Lorong Wisata di Kota Makassar menghasilkan umpan balik yang sangat penting untuk perbaikan dan optimalisasi upaya pemulihan ekonomi lokal. Keberhasilan program ini terlihat dari peningkatan aktivitas ekonomi, khususnya dalam mempromosikan potensi wisata berbasis kearifan lokal dan membuka peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Peningkatan jumlah wisatawan berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat langsung. Meskipun demikian, umpan balik dari masyarakat menyoroti kebutuhan perbaikan fasilitas, pelatihan pengelolaan bisnis, serta perhatian terhadap kebersihan dan keamanan.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Emerson & Tina (2012), yang menjelaskan bahwa dalam proses kolaborasi yang sukses, umpan balik berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja bersama dan melakukan penyesuaian strategi. Berdasarkan umpan balik tersebut, strategi dapat disesuaikan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengalaman wisata, memastikan

komunikasi antar pemangku kepentingan tetap terbuka, serta mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi lokal melalui kolaborasi yang lebih optimal.

Berikut penjelasan terkait Program Lorong Wisata di Kota Makassar belum sepenuhnya mampu memulihkan ekonomi secara maksimal.

No	Indikator	Penjelasan
1	Keterbatasan Infrastruktur	Berdasarkan laporan dari <i>Dinas Pariwisata Kota Makassar</i> (2024), sekitar 40% lorong wisata masih kekurangan fasilitas penunjang, seperti toilet umum, tempat sampah, dan papan informasi. Hal ini menyebabkan pengalaman wisatawan menjadi kurang optimal, sehingga jumlah kunjungan belum signifikan.
2	Kurangannya Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM	Data dari <i>Badan Pemberdayaan Masyarakat</i> menunjukkan bahwa hanya 30% pelaku UMKM yang aktif di lorong wisata telah menerima pelatihan pengelolaan usaha. Pelatihan yang terbatas menyebabkan banyak UMKM kurang mampu bersaing atau menawarkan produk inovatif yang menarik wisatawan.
3	Kendala Promosi dan Pemasaran	Menurut survei dari <i>Universitas Hasanuddin</i> (2023), hanya 25% dari lorong wisata yang memiliki akses digital marketing atau promosi daring. Hal ini membuat potensi wisata lokal sulit dikenal oleh wisatawan, terutama dari luar daerah.
4	Kebersihan dan Keamanan	Studi dari <i>Lembaga Penelitian Kota Makassar</i> (2024) mengungkapkan bahwa 75% wisatawan memberikan ulasan negatif terkait kebersihan dan keamanan lorong wisata. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dan minimnya pencahayaan di beberapa lorong menyebabkan wisatawan enggan untuk

No	Indikator	Penjelasan
		kembali.
5	Dampak Pandemi COVID-19 yang Masih Terasa	Data dari <i>Badan Pusat Statistik (BPS) Makassar</i> menunjukkan bahwa sektor pariwisata baru pulih 60% dari tingkat kunjungan pra-pandemi. Meskipun jumlah wisatawan mulai meningkat, daya beli masyarakat yang masih lemah membuat perputaran ekonomi di lorong wisata belum optimal.

Program Lorong Wisata di Kota Makassar memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal, meskipun hasilnya belum sepenuhnya maksimal. Salah satu dampaknya adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Keterlibatan aktif masyarakat dalam program ini, seperti membuka usaha kecil dan menengah (UMKM), menjual produk lokal berbasis kearifan budaya, serta menawarkan jasa terkait pariwisata, telah menciptakan peluang ekonomi baru yang berkelanjutan.

Namun, dampak ekonomi ini belum sepenuhnya maksimal karena berbagai tantangan yang masih dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan fasilitas wisata, yang sering kali belum memadai untuk mendukung kenyamanan wisatawan. Selain itu, pelatihan dan pendampingan pengelolaan usaha untuk masyarakat masih perlu ditingkatkan agar mereka dapat lebih kompeten dan inovatif dalam mengembangkan usaha mereka. Tantangan lain adalah kurangnya perhatian terhadap kebersihan dan keamanan lingkungan wisata, yang dapat memengaruhi pengalaman wisatawan dan pada akhirnya berdampak pada jumlah kunjungan wisata.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan diatas, maka dpaat disimpulkan bahwa :

1. Program Lorong Wisata di Kota Makassar menunjukkan penerapan dinamika kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, dengan mengedepankan prinsip bersama, motivasi kolektif, dan kapasitas bertindak bersama. Kolaborasi berkelanjutan ini berhasil tidak hanya dalam mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal, tetapi juga dalam memperkuat perekonomian lokal melalui pemberdayaan masyarakat, pelatihan, dan penciptaan peluang ekonomi yang berkelanjutan.
2. Tindakan kolaborasi dalam Program Lorong Wisata di Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh fasilitasi yang efektif, yang berperan penting dalam merumuskan peran dan kontribusi masing-masing pihak. Pemerintah, bersama Dewan Lorong Wisata, berperan sebagai pengkoordinasi yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta, untuk memastikan komunikasi yang jelas dan peran aktif dalam pengelolaan program. Fasilitasi ini mempercepat pencapaian tujuan bersama, seperti pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Koordinasi yang efektif, ditambah dengan pertemuan evaluasi berkala, menjamin penyelarasan visi antar pihak

yang terlibat, memperkuat kolaborasi berkelanjutan, dan mendukung pemulihan ekonomi daerah.

3. Dampak kolaborasi dalam Program Lorong Wisata di Kota Makassar menghasilkan umpan balik yang sangat krusial untuk perbaikan dan optimalisasi upaya pemulihan ekonomi lokal. Keberhasilan program ini tercermin dari peningkatan aktivitas ekonomi, terutama dalam mempromosikan potensi wisata berbasis kearifan lokal dan membuka peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Peningkatan jumlah wisatawan secara signifikan berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat langsung. Meskipun demikian, umpan balik dari masyarakat menyoroti adanya kebutuhan untuk perbaikan fasilitas, pelatihan pengelolaan bisnis, serta perhatian lebih terhadap kebersihan dan keamanan guna meningkatkan pengalaman wisata secara keseluruhan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, oleh karena itu peneliti menyarankan:

1. Dinas Pariwisata Kota Makassar harus lebih berperan aktif dan berkolaborasi dalam melakukan pengembangan untuk mengembangkan Lorong wisata di Kota Makassar.
2. Lurah Tello Baru dan Dewan Lorong harus membangun komunikasi dan melakukan pertemuan yang lebih intens.

3. Masyarakat juga harus aktif untuk melibatkan diri dalam kolaborasi pengembangan Lorong Wisata.



DAFTAR PUSTAKA

- Arma, N. A. (2023). The Collaborative Governance Dalam Pengembangan Smart Village Desa Pangandaran. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(2), 492–502. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i2.648>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Di Kota Makassar (Jiwa), 2022-2023*. <https://makassarkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/nzjmg==/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-makassar.html>
- Bopeng, G. R., Suwu, E. A. A., & Lasut, J. J. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemulihan Ekonomi Pariwisata Di Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmiah Society*, 3(3), 1–6.
- Cahyono, A. S., Dewi, R. S., Zauhar, S., Domai, T., & Siswidiyanto. (2023). Collaborative Governance Dalam Pelayanan Perlindungan Anak Di Indonesia Anang. *Jist*, 13(1), 104–116.
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Emerson, K., & Tina, N. (2012). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press.
- Fatmawati, & Nur Muqni Melliyan Harahap. (2024). Collaborative Governance Dalam Revitalisasi Wisata Danau Toba Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara. *Sumur- Jurnal Sosial Humaniora*, 2(2), 45–55. <https://doi.org/10.58794/sumur.v2i2.922>
- Gumanti, M., & Herinanto, D. (2024). *Membuka Pintu Dunia : Eksplorasi Tren Bisnis Pariwisata*. 29(1), 44–54.
- Hasna, A. L., & Darumurti, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob Di Kota Pekalongan. *Jisip Unja (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 7(1), 25–37. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.24210>
- Ilham, A., & Bonjol, S. I. (2024). *Kolaborasi Pemerintah Daerah Dengan Pt . Semesta Alam Barito Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah (Csr Studi Kasus)*. 2(1), 123–131.
- Jonatan, S., & Bahri, S. (2024). *Strategi Pemerintah Kota Makassar Dalam*

Pemulihan Ekonomi Melalui Program Makassar Recover Makassar City Government ' S Strategy For Economic Recovery Through The Makassar. 2(1), 34–40. <https://doi.org/10.35965/Pja.V2i1.4604>

M., D. S., & Senaen, W. M. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 7. <https://doi.org/10.31258/Jkp.11.1.P.7-12>

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sorcebook*. Thousand Oaks : Sage Publications.

Nurchahyany, N., Zunaidah, N. A., Sholikhah, K. I., Putri, Z., & Kirom, S. (2022). Upaya Pemulihan Dalam Meningkatkan Pengunjung Di Wisata Bukit Pertapaan Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Melalui Teknologi Informasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(5), 1543–1552. <https://doi.org/10.54082/Jamsi.471>

Peraturan Presiden. (2020). *Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional*.

Rahmadanti, R. A., & Fitriana, K. N. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Kulon Progo. *Journal Of Public Policy And Administration Research*, 01(02).

Rawali, S., & Ramadhani, M. M. (2024). Komunikasi Pariwisata Dalam Pengembangan Potensi Wisata. *Journal Of Communication Science*, 6(1), 168–178. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/kaganga>

Rayhannisa, A. A., & Pambudi, A. (2024). *Collaborative Governance Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Pandemi Covid19 Di Dinas Koperasi Dan Ukm Diy (Studi Kasus Aplikasi Sibakul Jogja)*. 02.

Saadah, S., Shaleh, K., Arwaty, D., Sukmawati, F., Mulyawan, R. F., & Nababan, D. (2023). Analisis Sektor Industri Pariwisata Yang Terdampak Covid – 19 Dan Upaya Pemulihan Ekonomi Indonesia Dari Sektor Pariwisata. *Jesya*, 6(1), 247–257. <https://doi.org/10.36778/Jesya.V6i1.914>

Saharuna, M. Y., & Rahman, A. (2024). *Pendampingan Inventarisasi Atraksi , Aksesibilitas , Dan Amenitas Desa Sebagai Komponen Penilaian Anugerah Desa Wisata (Adwi) Kemenparekraf*. 1(2), 107–120.

Sayuti, S., Almuhammad, Sofiyetti, & Sari, P. (2022). Efektivitas Edukasi Kesehatan Melalui Media Video Terhadap Tingkat Pengetahuan Siswa Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Di Smpn 19 Kota Jambi The Effectiveness Of Health Education Through Video Media On Students ' Knowledge Levels In The Application Of He. *Jurnal Kesmas Jambi (Jkmj)*,

6(2), 32–39. <https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Jkmj/Article/View/20624>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.

Thesa, S., Sarira, M. T., Ridwan, M., Madjid, R., Sugiarto, A., Sianipar, C. I., Takasi, L. O. M. R., & Sejati, A. E. (2024). Inovasi Paket Wisata Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Cv Holiday Indonesia, Kabupaten Balukumba). *Geography : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 12(1), 466. <https://doi.org/10.31764/Geography.V12i1.20836>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (N.D.).

Yahya, A. S., Kusmana, D., Ismunarta, & Sururama, R. (2024). Collaborative Governance dalam Penanganan Kemacetan Di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Media Birokrasi*, 6(1), 54–84. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jmb/article/view/4151/1873>

Yuliska, F., Azizah, N., & Pikri, I. (2024). Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Gurun Pasir Telaga Biru Pulau Bintang Era New Normal Pendahuluan Pada Awal Tahun 2020 , Hampir Seluruh Negara Di Dunia Termasuk Pula Indonesia Mengalami Tekanan Hebat Yang Diakibatkan Oleh Virus Corona . Wabah. *Exero: Journal Of Research In Business And Economics*, 7(2), 131–147.





LAMPIRAN

1. Persuratan


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **29521/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
Lampiran : - Walikota Makassar
Perihal : **Izin penelitian** di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5302/05/c.4-viii/xi/1446/2024 tanggal 13 November 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **EKO MIFTAHUL FARID**
Nomor Pokok : 105611111918
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauaddin No. 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI MELALUI PROGRAM LORONG WISATA DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 November 2024 s/d 20 Januari 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 19 November 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PARIWISATA

Jl. Urip Sumoharjo No. 58, Makassar 90144. Phone/Fax : 0411 - 424 832
[E : mkssombere@gmail.com] - [T : @mks_sombere] - [W : www.tourism-makassar.id]
Facebook Fanpage: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 008/046/DISPAR/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Roem, S.STP., M.Si**

NIP : 19831110 200212 1 001

Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IVb

Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar

Menerangkan bahwa mahasiswa(i) di bawah ini :

Nama : **Eko Miftahul Farid**

NIM / Jurusan : 105611111918/ Ilmu Administrasi Negara

Pekerjaan : Mahasiswa / Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Dinas Pariwisata Kota Makassar pada tanggal 02 Januari 2025.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 03 Januari 2025

Kepala Dinas



Muhammad Roem, S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19831110 200212 1 001

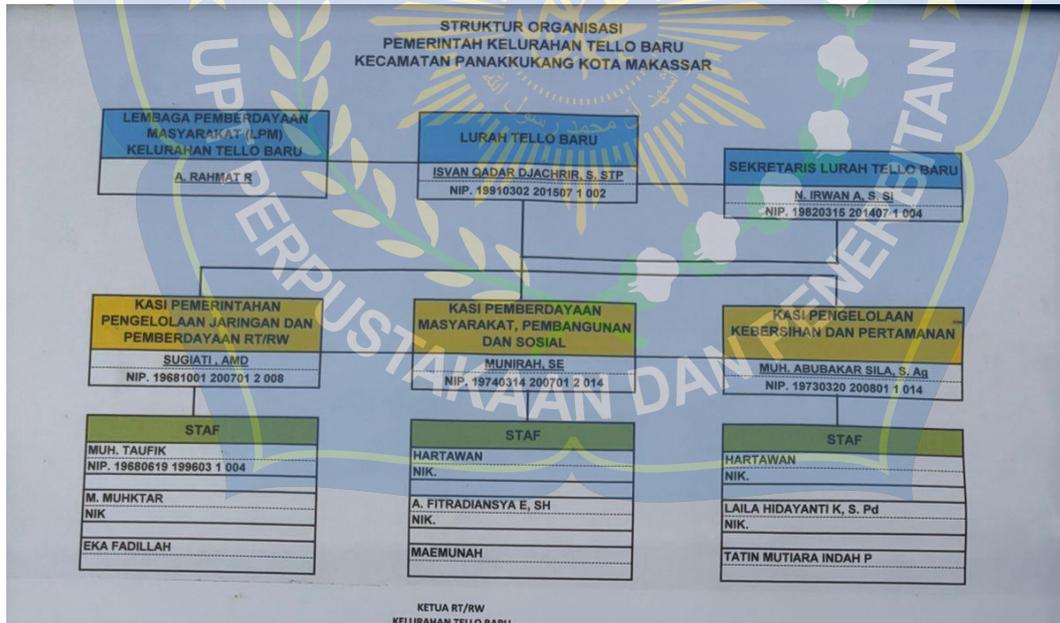
2. Wawancara pada Dinas Pariwisata Kota Makassar

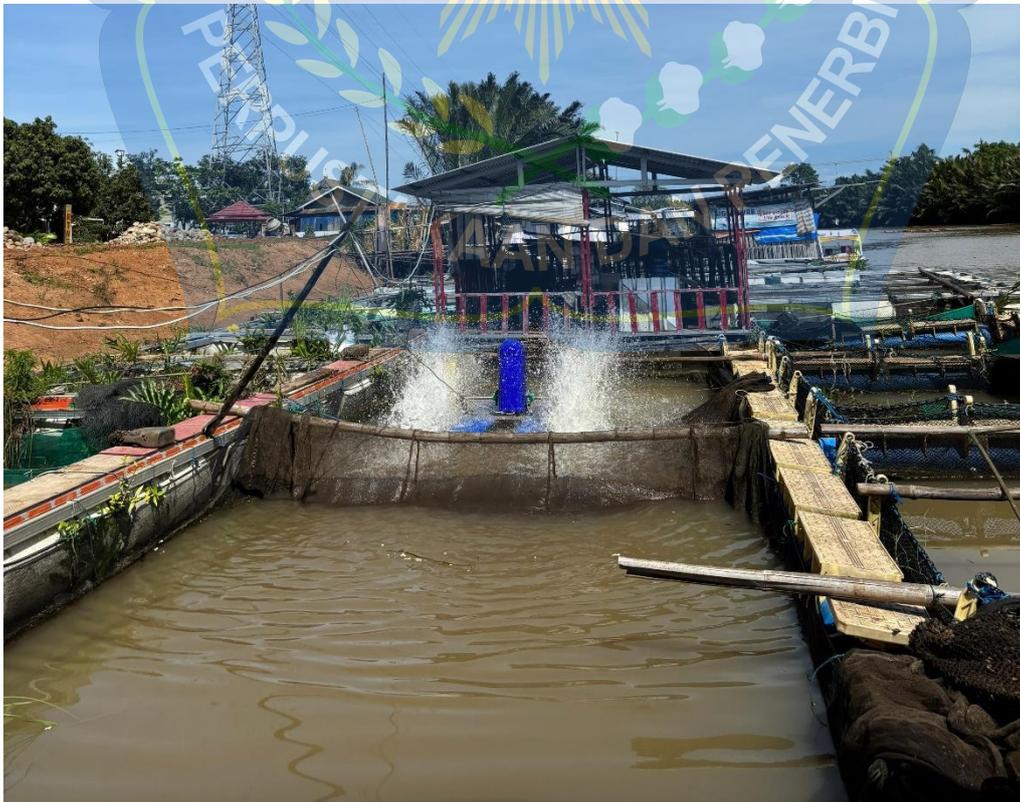




3. Wawancara di Kantor Lurah Tello Baru









DERMAGA RESTO & KAFE RTM RW. Tello Mandiri Makassar

Sebelum Renovasi



Proses Renovasi



Sesudah Renovasi





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Eko Miftahul Farid
Nim : 1056111111918
Program Studi : Ilmu Administarsi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	7 %	25 %
3	Bab 3	9 %	15 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Januari 2025
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursina, S.Hum, M.I.P.
NBM.964.591

Eko miftahul farid - 10561111918



5% SIMILARITY INDEX
5% INTERNET SOURCES
1% PUBLICATIONS
% STUDENT PAPERS

Rank	Source	Percentage
1	eprints.umm.ac.id Internet Source	2%
2	www.scribd.com Internet Source	1%
3	journal.fkm.ui.ac.id Internet Source	1%
4	makalah1212.blogspot.com Internet Source	<1%
5	lipsus.kompas.com Internet Source	<1%
6	nanopdf.com Internet Source	<1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches Off

AB II Eko miftahul farid - 105611111918

ORIGINALITY REPORT



7 % SIMILARITY INDEX

7 % INTERNET SOURCES

3 % PUBLICATIONS

% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	online-journal.unja.ac.id Internet Source	3%
2	journal.unair.ac.id Internet Source	2%
3	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	1%
4	journal.unismuh.ac.id Internet Source	1%
5	repository.unair.ac.id Internet Source	<1%
6	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1%
7	text-id.123dok.com Internet Source	<1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

AB III Eko miftahul farid - 10561111918

ORIGINALITY REPORT

LULUS

9%

9%

6%

%

PRIMARY SOURCES

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.ums.ac.id

Internet Source

6%

2

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

2%

3

pt.scribd.com

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

AB IV Eko miftahul farid - 105611111918

ORIGINALITY REPORT

5%



5%

1%

%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Similarity Index
1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
2	123dok.com Internet Source	1%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
4	geograf.id Internet Source	<1%
5	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1%
6	diperpautkan.bantulkab.go.id Internet Source	<1%
7	Miskari. "The Implementation of Waqf Law within the Framework of Indonesia's Legal State: An Analysis of Pancasila Values", Istinbath : Jurnal Hukum, 2024 Publication	<1%
8	aphikaltim.org Internet Source	<1%

9	core.ac.uk Internet Source	<1 %
10	edoc.pub Internet Source	<1 %
11	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
12	id.berita.yahoo.com Internet Source	<1 %
13	jkjournal.kalselprov.go.id Internet Source	<1 %
14	www.horizondipantara.com Internet Source	<1 %
15	www.rumahtaaruf.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off Exclude matches Off
 Exclude bibliography Off



Verification. The results
a Program
ment,
and
per

AB V Eko Miftahul farid - 105611111918

ORIGINALITY REPORT

5%



5%

0%

%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.provisieducation.com

Internet Source

2%

2

jkjournal.kalselprov.go.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



RIWAYAT HIDUP



Eko Miftahul Farid , lahir pada tanggal 27 Mei 2000 di Sinjai, Kab. Sinjai. Penulis lahir dari pasangan Hasan dan Yulianti, yang merupakan Tunggal. Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) di SDN 52 Pude, pada tahun 2012 penulis memasuki Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP N 2 Sinjai Selatan dan tamat tahun 2015. Setelah tamat dari SMP, penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 2 Sinjai Selatan dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dalam menjalankan akademik di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar, serta dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Collaborative Governance Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Melalui Program Lorong Wisata Di Kota Makassar”.